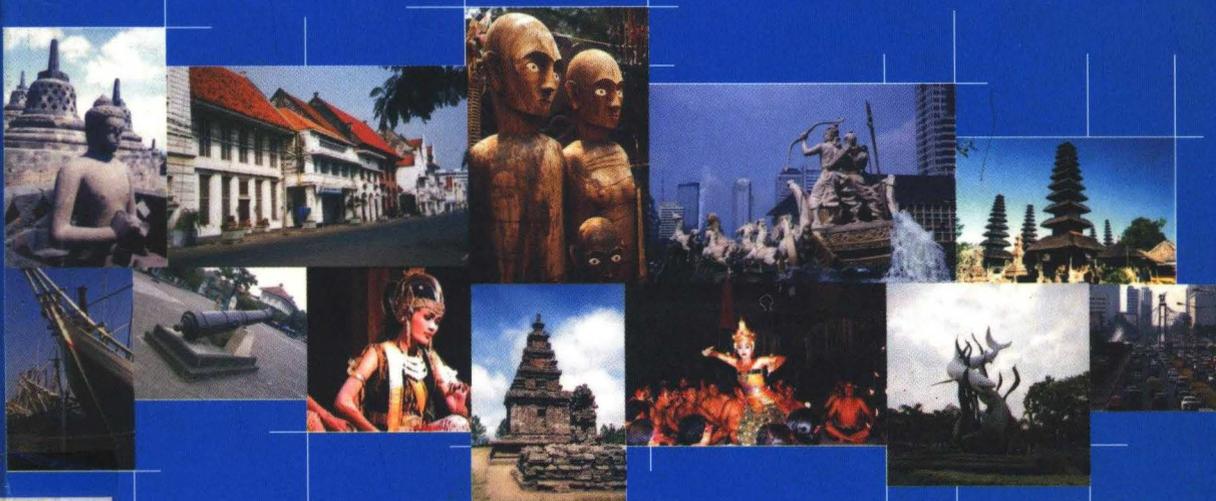


PENYUSUNAN PEDOMAN

NERACA SATELIT PARIWISATA DAERAH (NESPARDA)

PENYUSUNAN PEDOMAN NERACA SATELIT PARIWISATA DAERAH



2.17
NER

ustakaan
an & Pariwisata

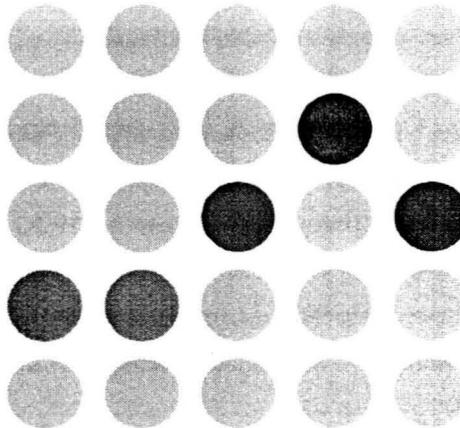
DA)



KERJASAMA ANTARA
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DENGAN
KOPERASI BADAN PUSAT STATISTIK
JAKARTA, 2005



PENYUSUNAN PEDOMAN NERACA SATELIT PARIWISATA DAERAH (NESPARDA)



**KERJASAMA ANTARA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DENGAN
KOPERASI BADAN PUSAT STATISTIK**

JAKARTA, 2005



KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda) ini disusun sebagai petunjuk dan pegangan bagi instansi pemerintah dan swasta daerah, yang terkait dan berkepentingan dengan Nesparda, dalam menyusun dan atau memahami Nesparda.

Buku ini memuat berbagai hal yang perlu dipahami terutama mengenai data yang dibutuhkan, metode pengukuran dampak pariwisata, simulasi penghitungan dan penyajiannya.

Untuk mengimplementasikan pedoman ini diharapkan instansi terkait yaitu Badan Pusat Statistik Daerah, Dinas Pariwisata Daerah, Bappeda dan Asosiasi Industri Pariwisata (PHRI, Asita dsb) membentuk tim kerja untuk melakukan pengumpulan data dan penyusunan Nesparda.

Semoga buku pedoman ini dapat berguna bagi penyusunan kebijakan pembangunan pariwisata daerah. Saran dan kritik bagi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya pedoman ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2005

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Perkembangan Pariwisata Dunia	I - 1
B. Kontribusi Pariwisata Indonesia	I - 3
C. Kerangka Teoritis	I - 8
D. Neraca Satelit Pariwisata	I - 11
E. Permasalahan	I - 12
F. Institusi Terkait Penyusunan Nesparda	I - 13
BAB II. MODEL PENGUKURAN DAMPAK PARIWISATA	
A. Pendekatan Model	II - 1
B. Kerangka Umum Tabel Input Output	II - 3
C. Model Input Output	II - 7
1. Dampak Terhadap Output	II - 9
2. Dampak Terhadap Nilai Tambah Bruto	II - 12
3. Dampak Terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja	II - 14
D. Pengukuran Dampak Ekonomis Pariwisata	II - 16
1. Dampak Terhadap Output	II - 17
2. Dampak Terhadap Nilai Tambah Bruto	II - 18
3. Dampak Terhadap Upah/Gaji	II - 19
4. Dampak Terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja	II - 19
5. Dampak Terhadap Pajak tidak Langsung	II - 20

BAB III. DATA YANG DIBUTUHKAN	
A. Pengeluaran Wisatawan	III - 2
B. Penyediaan Barang dan Jasa Bagi Pariwisata	III - 8
C. Investasi Terkait Pariwisata (Pemerintah dan Dunia Usaha)	III - 10
D. Tenaga Kerja Pariwisata	III - 12
E. Pengeluaran Lainnya Terkait Pariwisata	III - 13
F. Rangkuman Kebutuhan Data	III - 14
BAB IV. SIMULASI PENGHITUNGAN DAMPAK GANDA	
A. Konversi Pengeluaran Wisman	IV - 2
B. Konversi Pengeluaran Wisnus	IV - 5
C. Contoh Penghitungan Dampak Pariwisata	IV - 8
BAB V. PENYAJIAN NERACA SATELIT PARIWISATA	
Struktur Pengeluaran Wisatawan Mancanegara	V - 4
Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara (<i>Domestic Inbound Tourist</i>)	V - 6
Struktur Pengeluaran Wisatawan Nusantara (<i>Domestic Tourist</i>)	V - 9
Struktur Pengeluaran Wisatawan ke Luar Negeri	V - 11
Struktur Pengeluaran Wisatawan ke Luar Propinsi	V - 14
Struktur Pengeluaran Seluruh Wisatawan	V - 16
Struktur Produksi Sektor-Sektor yang Terkait Pariwisata	V - 19
Struktur Pembentukan Modal Tetap Bruto	V - 20

Struktur Pekerja pada Industri Pariwisata	V - 24
Struktur Pengeluaran Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha	V - 25
Peranan Pariwisata dalam Struktur PDRB dari Sisi Penggunaan	V - 27
Dampak Pariwisata terhadap Output, NTB, Upah/Gaji, Pajak Tak Langsung dan Tenaga Kerja menurut Sektor Supply	V - 28
Indikator Fisik Kepariwisataaan	V - 36

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. PERKEMBANGAN PARIWISATA DUNIA

Sudah diakui bahwa industri pariwisata merupakan salah satu industri terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. Bersama dengan industri teknologi dan informasi, industri pariwisata diperkirakan menjadi *prime mover* perekonomian abad 21.

Perkembangan pariwisata Indonesia tak terlepas dari perkembangan pariwisata dunia. Dari sanalah optimisme ini tumbuh. Adalah WTO (World Tourism Organization) yang melontarkan estimasi optimistik dalam WTO's Tourism 2020 Vision. WTO memperkirakan jumlah kunjungan wisatawan internasional di seluruh dunia akan mencapai 1.006,4 juta pada tahun 2010

dan 1.561,1 juta pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut 1,18 milyar merupakan kunjungan intraregional dan sisanya sebanyak 377 juta merupakan *long haul*.

Secara total, tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan diperkirakan 4,1 persen per tahun. Untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik diperkirakan dapat dicapai pertumbuhan yang lebih tinggi yaitu 6,5 persen. Bahkan di negara tertentu pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dapat tercapai.

Angka estimasi WTO ini sudah tentu sangat menggiurkan pelaku usaha pariwisata. Potensi itu tak boleh hanya dibiarkan menjadi peluang liar yang sulit ditangkap. Oleh sebab itu banyak negara terutama di Asia Pasifik berpacu dan berbenah diri untuk membangun industri pariwisatanya.

Gelombang pariwisata internasional yang besar ini juga akan melanda Indonesia dengan getaran riaknya yang menyentuh banyak sektor ekonomi. Akankah gelombang besar itu benar-benar sampai di pantai Indonesia atau kembali lagi ke laut lepas setelah melihat seonggok sampah permasalahan di bumi pertiwi ini. Kita harapkan hal itu jangan pernah terjadi. Kita harus optimistik namun tetap berdiri di atas realitas.

Menangani industri pariwisata memang lebih rumit dari pada menangani industri pesawat terbang. Industri pesawat terbang memerlukan teknologi canggih dan modal besar namun tidak melibatkan multi sektor. Sedangkan industri pariwisata melibatkan hampir semua sektor ekonomi baik yang tergolong *tourism characteristic industry* seperti hotel dan restoran maupun *tourism connected industry* yaitu industri yang sepiintas tak berkaitan dengan industri pariwisata namun sebagian *demand* nya berasal dari pariwisata. Jumlah industri yang terkait dan menerima dampak *multiplier* dari pariwisata sungguh tak terbilang. Dampak multiplier itulah yang akan dihitung dan dibuatkan pedoman penghitungannya.

B. KONTRIBUSI PARIWISATA INDONESIA

Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Dampak berganda yang ditimbulkan pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara cukup signifikan.

1. Penerimaan Devisa

Selama ini sektor pariwisata menduduki peringkat kedua dalam penerimaan devisa setelah minyak dan gas. Seperti terlihat pada tabel berikut, walaupun terjadi fluktuasi dalam penerimaan dari pariwisata, namun peringkat kedua itu masih dapat dipertahankan.

**Tabel 1.1. Penerimaan Devisa Ekspor
Menurut Komoditi Tahun 2002-2004**
(Dalam miliar dollar US\$)

Komoditi	2002	2003	2004
Minyak dan Gas Bumi	12.11	13.65	15.64
Pariwisata	4.31	4.04	4.80
Pakaian Jadi	3.89	3.89	4.35
Kayu Olahan	3.25	3.16	3.25
Alat Listrik	2.70	3.12	3.49
Kontribusi Pariwisata terhadap Total Ekspor	7.54%	6.60%	6.71%

Sumber : BPS, 2004

Pada tabel di atas terlihat bahwa dalam kurun waktu 2002 – 2004 penerimaan devisa dari semua sektor selalu meningkat kecuali dari pariwisata. Pada tahun 2003 kunjungan wisman mengalami penurunan

sebagai akibat dari dampak tragedi bom Bali yang masih terasa dan wabah SARS sehingga devisa yang diterima menurun dari \$ 4,31 menjadi \$ 4.04. Namun pada tahun 2004 kepariwisataan Indonesia berhasil pulih. Citra Indonesia sebagai destinasi yang aman, indah dan nyaman kembali menguat. Pada tahun 2004 penerimaan devisa dari pariwisata meningkat menjadi \$ 4.80.

2. Dampak Terhadap Ekonomi

Dampak positif yang ditimbulkan pariwisata terhadap perekonomian bukan hanya dari pengeluaran/konsumsi wisatawan mancanegara. Pengeluaran wisatawan nusantara dan pengeluaran wisatawan outbound (wisatawan Indonesia ke luar negeri) ketika mereka akan berangkat dan setelah kembali juga cukup besar dampaknya. Begitu juga investasi yang dilakukan industri pariwisata seperti hotel dan restoran serta pengeluaran pemerintah Pusat dan Daerah di sektor pariwisata turut memberi dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia.

Dengan demikian berarti pertumbuhan sektor pariwisata juga mendorong laju pertumbuhan sektor-sektor lain termasuk pertanian. Secara agregat dampak pariwisata terhadap ekonomi dapat berupa pembentukan output nasional, Produk Domestik Bruto (PDB), pembayaran upah/gaji, penerimaan pajak dan penyerapan tenaga kerja. Dampak pariwisata terhadap perekonomian makro dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut :

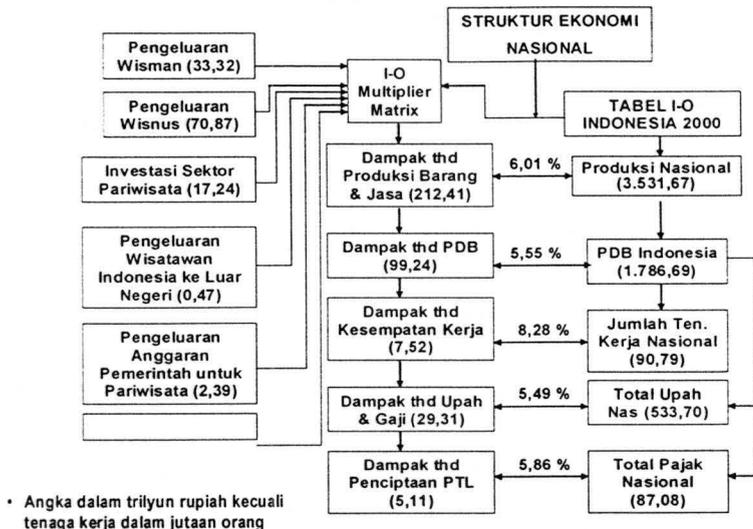
Tabel 1.2. Dampak Pariwisata Menurut Parameter Ekonomi

Dampak Terhadap	Satuan	2001		2002		2003	
		Nilai	% thd nasional	Nilai	% thd nasional	Nilai	% thd nasional
Output	Triliun	215,05	7,88	209,20	6,11	212.41	6.01
PDB	Triliun	115,17	7,72	98,59	6,12	99.24	5.55
Upah & gaji	Triliun	34,32	8,42	29,94	6,41	29.31	5.49
Pajak	Triliun	5,44	8,84	5,56	7,81	5.11	5.86
Tenaga Kerja	Juta	7,78	8,57	7,96	8,69	7.52	8.28

Pada tabel di atas terlihat bahwa secara umum dampak pariwisata terhadap ekonomi Indonesia yang ditunjukkan oleh kontribusi pariwisata terhadap output, produk domestik bruto, upah gaji dan pajak tak langsung dari tahun 2001 sampai tahun 2003 cenderung menurun. Hal ini tidak terlepas dari tragedi yang dialami dunia pariwisata seperti telah dijelaskan di atas. Namun, dengan adanya kenaikan jumlah wisman dan penerimaan devisa pada tahun 2004, kontribusi pariwisata terhadap perekonomian Indonesia diharapkan akan meningkat

Sebagai gambaran menyeluruh mengenai dampak ekonomi pariwisata, pada diagram di bawah disajikan dampak ekonomi pariwisata Tahun 2003.

DAMPAK EKONOMI PARIWISATA NASIONAL, TAHUN 2003



Pada bagan di atas terlihat bahwa kontribusi PDB sektor terhadap PDB total adalah sebesar 5,55 %. Walaupun demikian sektor pariwisata mampu menyerap tenaga kerja sebesar 8,28 % dari total tenaga kerja nasional atau sebesar 7,52 juta orang. Ini berarti sektor pariwisata menghidupi sekitar 37,5 penduduk Indonesia.

3. Penerimaan Pajak

Sektor pariwisata juga merupakan sumber pendapatan daerah dalam bentuk pajak. Sebagaimana diketahui pemerintah daerah kabupaten dan kota memungut pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah. Pajak daerah yang berkaitan erat dengan pariwisata adalah pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan. Ketiga jenis pajak daerah ini menghasilkan pendapatan sebesar Rp1.513 milyar atau 12,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.3. Penerimaan Pajak Daerah Seluruh Indonesia dan sektor Pariwisata, Tahun 2004

Jenis Pajak	Jumlah (milyar Rp)	% thd PAD
Pajak Hotel	853	6,9
Pajak Restoran	496	4,0
Pajak Hiburan	164	1,3
Jumlah	1.513	12,15
P A D	12.451	

Pada beberapa propinsi yaitu DKI Jakarta, Bali, Riau, DIY dan Kaltim pajak hotel dan restoran memberikan sumbangan lebih dari 30 persen pada pajak daerah. DKI Jakarta merupakan propinsi yang paling besar menghasilkan pendapatan dari ketiga jenis pajak tersebut.

4. PNBP Dari VoA

Sejak 1 Pebruari 2004 pemerintah Republik Indonesia memberlakukan kebijakan visa baru yaitu Visa on Arrival (VoA) untuk WNA dari 22 negara yang masuk ke Indonesia dari 29 pintu masuk (bandara dan pelabuhan) dengan membayar \$10 untuk masa kunjungan 3 hari dan \$ 25 untuk masa kunjungan 30 hari.

Selama tahun 2004, dari 12 pintu masuk utama tercatat 1.471.516 wisman yang menggunakan fasilitas VoA baik untuk masa kunjungan 3 hari maupun 30 hari. Sebanyak 95,5 persen wisman menggunakan VoA untuk masa kunjungan 30 hari. Berdasarkan data tersebut diperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima negara adalah sebesar Rp 340 milyar. Sebagian besar PNBP dari VoA diterima melalui bandara Ngurah Rai, Bali yaitu sebesar Rp 243 milyar.

C. KERANGKA TEORITIS

1. Dampak Ekonomi Pariwisata

Pariwisata sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi perekonomian. Dengan ekonomi yang maju pariwisata akan berkembang karena didukung oleh kesejahteraan penduduk dan fasilitas daerah tujuan wisata yang memadai. Hal sebaliknya juga dapat terjadi yaitu pariwisata dapat mendorong perekonomian regional dan nasional. Kegiatan pariwisata akan menimbulkan demand akan barang dan jasa yang selanjutnya akan merangsang pertumbuhan produksi.

Sektor pariwisata bukanlah sektor yang berdiri sendiri, tetapi merupakan industri multi sektor. Karena itu maka dampak ekonomi yang ditimbulkan pariwisata juga berdimensi multi sektor. Dampak ekonomi tersebut dapat berupa pertumbuhan industri/usaha yang terkait dengan pariwisata atau industri/usaha yang berkarakteristik pariwisata, peningkatan pendapatan penduduk, kesempatan kerja dan investasi.

Sektor pariwisata berkaitan secara langsung dan tak langsung dengan berbagai sektor perekonomian yang memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang sebagian atau seluruhnya dikonsumsi oleh wisatawan, baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Dengan demikian berarti pertumbuhan sektor pariwisata dapat dianggap sebagai pendorong laju pertumbuhan sektor-sektor lain termasuk pertanian. Dampak ekonomis pariwisata yang lintas sektor ini bahkan juga melintas multi sektor dalam bentuk pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan investasi.

Pariwisata dalam proses pengembangannya mempunyai dampak yang tidak sama pada daerah atau wilayah yang berbeda. Hal itu terlihat

baik dalam lingkup yang besar seperti dalam lingkup negara yaitu antara negara berkembang dengan negara maju, atau dalam lingkup yang lebih sempit yaitu dalam lingkup wilayah/propinsi dalam suatu negara.

Perbedaan dampak antar daerah belum tentu merugikan. Bahkan dapat berperan penting dalam mengurangi ketimpangan kerja dan ketimpangan pendapatan antar daerah di dalam suatu negara. Bukankah kerap kali obyek dan daya tarik wisata terutama wisata alam umumnya terletak jauh dari pusat aktivitas perekonomian. Pengurangan tingkat ketimpangan ini dimungkinkan karena aktivitas pariwisata memiliki karakteristik yang tidak dimiliki kegiatan di sektor lain. Konsumentenlah yang datang ke produsennya, untuk membelanjakan uangnya pada berbagai barang dan jasa yang ditawarkan masyarakat di daerah wisata.

Jenis kegiatan yang terkait dengan pariwisata serta dampak yang diciptakan, belum diidentifikasi secara jelas dan masih terus menjadi pembicaraan. Selama ini banyak kajian dan analisis hasil pembangunan kepariwisataan yang baru mencakup sebagian aspek dan dilakukan secara terpisah-pisah. Demikian juga metodologi dan indikator yang digunakan masih sederhana, sehingga hasilnya saling tidak konsisten serta kurang akurat. Sudah tentu bila diaplikasikan ke dalam perumusan kebijakan, akan menghasilkan kebijakan yang kurang tajam dan tidak menyeluruh.

2. Konsep Dampak Ganda (*Multiplier Effect*)

Konsep Dampak Ganda didasarkan pada hubungan berbagai sektor pembentuk ekonomi yang saling terkait serta memiliki ketergantungan dalam ekonomi lokal. Oleh karenanya, setiap perubahan pada tingkat pengeluaran wisatawan, sebagai salah satu sektor pembentuk ekonomi, akan

mempengaruhi industri barang dan jasa. Setiap perubahan seperti pengeluaran wisatawan berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran (*output*), nilai tambah, upah/gaji, ketenagakerjaan (*employment*), penerimaan negara (*government revenue*), dan neraca pembayaran. Rasio perubahan dalam setiap variabel diatas terhadap perubahan dalam permintaan akhir (dalam hal ini pengeluaran wisatawan) disebut pengganda (*multiplier*).

Kompleksitas dari analisis pengganda tergantung dari seluk beluk transaksi yang terdapat pada sektor ekonomi di tiap daerah. Pariwisata mempunyai kompleksitas yang tinggi karena keterkaitannya dengan banyak sektor ekonomi, seperti akomodasi/hotel, restoran, transportasi, jasa hiburan dan rekreasi serta industri cinderamata. Dampak yang ditimbulkan sektor pariwisata dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak langsung (*direct effect*), dampak tak langsung (*indirect effect*) dan dampak ikutan (*induced effect*).

Pada **dampak langsung**, dampak outputnya akan sama dengan nilai perubahan pada permintaan akhir. Pengeluaran wisatawan secara langsung akan menimbulkan pendapatan bagi industri pariwisata seperti hotel, restoran dan usaha kerajinan. Perkembangan kunjungan wisatawan secara otomatis merupakan pertumbuhan industri pariwisata. Sedangkan **dampak tak langsung** mengacu pada kelanjutan dari kebutuhan sebuah industri yang mengalami peningkatan permintaan produknya untuk melakukan pembelian dari industri lain yang terkait. Misalnya hotel yang mendapat tamu wisatawan akan membayar gaji atau membeli barang keperluan hotelnya dari pedagang alat rumah tangga. Permintaan dari hotel ini merupakan *derivative demand* yang tidak berhenti pada pedagang saja tetapi akan terus berlanjut sampai industri hulu.

Dampak ikutan terjadi karena peningkatan pendapatan, akibat peningkatan permintaan akhir, sebagian akan dibelanjakan untuk konsumsi barang dan jasa yang tidak berkaitan dengan permintaan akhir tersebut. Penjual souvenir akan membelanjakan sebagian pendapatannya untuk memperbaiki rumah, menyekolahkan anak, membeli barang elektronik dan sebagainya. Makin banyak yang dibelanjakan oleh industri pariwisata dan industri terkait untuk berbagai jenis barang dan jasa, makin besar dampak ikutan dari sektor pariwisata. Pemasok barang dan jasa akan meningkat pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini akan mendorong lebih lanjut perekonomian masyarakat sehingga kesempatan kerja dan pendapatan makin lama makin meningkat.

D. NERACA SATELIT PARIWISATA

Untuk mengkaji dan menganalisis kontribusi dan dampak pariwisata terhadap perekonomian secara komprehensif dan akurat, dibutuhkan suatu sistem neraca terpadu industri pariwisata yang disebut (*Tourism Satellite Account*, disingkat *TSA*) atau neraca satelit pariwisata. Untuk tingkat nasional disebut neraca satelit pariwisata nasional (*Nesparnas*) dan untuk tingkat daerah disebut *Nesparda*. Neraca satelit pariwisata adalah suatu sistem, konsep dan metode penyajian informasi kuantitatif industri pariwisata yang bersifat menyeluruh (*comprehensive*), kompak (*compact*), saling terkait (*interconnected*), konsisten (*consistent*) dan terkontrol (*controllable*).

Neraca satelit pariwisata menyajikan statistik dalam bentuk neraca dan matrik yang menggambarkan hubungan ekonomi baik antar pelaku pariwisata dengan pelaku ekonomi lainnya maupun antar pelaku pariwisata

sendiri. Dengan demikian nesparnas(da) mendeskripsikan seluruh aktivitas ekonomi pariwisata dan transaksinya dalam penyediaan jasa pariwisata dan penunjangnya dalam konsumsi produk pariwisata.

Sistem ini terbilang ampuh dan handal dalam menjawab tantangan penyediaan informasi kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan kepariwisataan pada masa lalu serta sekaligus menjawab tantangan dan permasalahan pariwisata di masa datang. Neraca satelit pariwisata dikembangkan untuk tujuan pengukuran dan analisis dampak kegiatan pariwisata yang bersifat multisektor dan multidimensi terhadap ekonomi nasional dan regional.

Pada sisi penyediaan jasa pariwisata terdapat aktivitas antara lain hotel, restoran, transportasi, biro perjalanan, rekreasi dan hiburan, objek wisata, serta kegiatan penunjang seperti usaha persewaan, money changer, pusat industri kerajinan, pusat pertokoan, dan sebagainya. Sedangkan dari sisi permintaan terdapat aktivitas ekonomi konsumsi yang dilakukan oleh para wisatawan (wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara, dan wisatawan Indonesia ke luar negeri - outbound). Dengan neraca satelit pariwisata sebenarnya ingin dilihat ada tidaknya keseimbangan antara penyediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) jasa pariwisata dalam spektrum luas.

E. PERMASALAHAN

Pada tingkat Daerah, dampak pariwisata terhadap perekonomian belum diidentifikasi secara jelas. Ketidajelasan ini memungkinkan suatu kebijakan atau analisis ekonomi regional dan sektoral yang berhubungan dengan kepariwisataan dapat menghasilkan kebijakan dan hasil analisis yang

tumpang tindih atau sama sekali tidak diperhitungkan. Hal ini dapat berdampak pada kebijakan daerah yang kurang peka dan boros serta analisis yang kurang tajam. Padahal hal itu dapat dihindari dengan disusunnya Neraca Satelit Pariwisata Daerah (Nesparda).

Dari sini permasalahan yang diangkat adalah *bagaimana menyiapkan suatu pedoman penyusunan Nesparda yang selain menguraikan landasan teoritis, juga memberikan contoh dan simulasi penghitungan indikator dan penyajian Nesparda yang mudah dipahami bagi Institusi yang diberi tanggungjawab penyusunan Nesparda di daerah.*

F. INSTITUSI TERKAIT PENYUSUNAN NESPARDA

Kerja sama antar institusi/lembaga sangat diperlukan dalam melakukan penyusunan Nesparda ini. Ada tiga institusi yang perlu dilibatkan secara langsung yaitu Badan Pusat Statistik Propinsi/ Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata Propinsi/Kabupaten/Kota, dan Asosiasi Industri Pariwisata di daerah dengan dibantu oleh Bapeda setempat. Adapun tim utama dalam penyusunan Nesparda ini adalah Badan Pusat Statistik, terutama yang bertanggung jawab dalam penyusunan Statistik Pariwisata dan Neraca Regional. Sementara itu Dinas Pariwisata bertugas mengorganisasi sumber data utama yaitu data pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, data investasi, promosi, dan data tenaga kerja industri pariwisata serta bersama asosiasi industri pariwisata mengumpulkan data lain yang dibutuhkan. Ketiga institusi ini perlu melakukan diskusi secara reguler khususnya untuk memecahkan masalah teknis seperti bagaimana mendapatkan data, konsep dan definisi serta menentukan kerangka Nesparda.

BAB II

MODEL PENGUKURAN DAMPAK PARIWISATA

A. PENDEKATAN MODEL

Kegiatan pariwisata menimbulkan permintaan akan barang dan jasa pada industri pariwisata dan industri terkait. Dorongan dari permintaan yang ditimbulkan oleh pariwisata menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Dampak kegiatan pariwisata terhadap perekonomian daerah dan nasional sejatinya adalah dampak dari pengeluaran wisatawan mancanegara dan nusantara terhadap sejumlah variabel makro ekonomi, disamping dampak

dari pengeluaran pemerintah pusat dan daerah untuk promosi dan pembinaan pariwisata; dan investasi pemerintah dan swasta di bidang pariwisata.

Teori ekonomi makro menyatakan bahwa jika terjadi perubahan permintaan, maka output dan variabel ekonomi lainnya dari setiap sektor penyedia juga akan mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi melalui pengaruh langsung dan tidak langsung permintaan pada seluruh sektor penyedia. Jadi tambahan permintaan akan menghasilkan tambahan output yang lebih besar dari jumlah permintaan itu sendiri. Lebih konkritnya, kinerja ekonomi kepariwisataan yang diukur dengan pengeluaran wisatawan akan mempengaruhi output, nilai tambah bruto, upah dan gaji, pajak tak langsung dan tenaga kerja.

Untuk mengetahui dampak pariwisata terhadap perekonomian nasional, digunakan Model Input Output. Analisis input – output merupakan adaptasi persamaan umum teori neo klasik tentang ketergantungan kuantitatif antara kegiatan ekonomi yang berdasarkan studi empiris saling berhubungan. Analisis input output pada dasarnya mencoba menyoroiti struktur internal ekonomi dan tingkat ketergantungannya. Misal output suatu industri menjadi input industri lain. Hal ini juga terjadi pada Industri pariwisata yang banyak menerima input dari berbagai industri lain.

Dengan menggunakan analisis input output dampak dari permintaan akhir (*final demand*) terhadap beberapa peubah ekonomi dari sisi penawaran dapat diukur. Model ini didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi yang memiliki asumsi homogenitas (kesatuan output), proporsionalitas (hubungan linear input dan ouput) dan aditivitas.

B. KERANGKA UMUM TABEL INPUT OUTPUT

Tabel Input-Output (I-O) merupakan suatu sistem informasi statistik yang disusun dalam bentuk matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta saling keterkaitan antara sektor yang satu dengan sektor lainnya (*inter-industry relationship*), dalam suatu wilayah pada suatu periode waktu tertentu. Keterkaitan itu tergambarkan oleh besarnya input yang digunakan dalam proses produksi. Dengan menggunakan Tabel I-O dapat dilihat bagaimana output dari suatu sektor ekonomi didistribusikan ke sektor-sektor lainnya dan bagaimana pula suatu sektor memperoleh input yang diperlukan dari sektor-sektor lainnya.

Dalam suatu model input-output yang bersifat terbuka dan statis, transaksi-transaksi yang digunakan dalam penyusunan Tabel Input-Output harus memenuhi tiga asumsi atau prinsip dasar, yaitu:

1. Keseragaman (*homogeneity*), yaitu asumsi bahwa setiap sektor hanya memproduksi satu jenis output (barang dan jasa) dengan struktur input tunggal (seragam) dan tidak ada substitusi otomatis antar output dari sektor yang berbeda.
2. Kesebandingan (*proportionality*), yaitu asumsi bahwa kenaikan/penurunan jumlah input yang digunakan oleh suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan/penurunan output yang dihasilkan.
3. Penjumlahan (*additivity*), yaitu asumsi bahwa jumlah pengaruh kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan dari pengaruh pada masing-masing sektor tersebut.

Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana suatu Tabel I-O disusun, maka pada Tabel 2.1. disajikan contoh Tabel I-O untuk sistem perekonomian yang terdiri dari tiga sektor produksi, yaitu sektor 1, 2 dan 3. Sektor 1 meliputi sektor pertanian dan pertambangan, sektor 2 meliputi sektor industri pengolahan, listrik, gas dan air minum, dan bangunan; dan sektor 3 adalah sektor lainnya.

Tabel 2.1.
Tabel Input-Output Untuk
Sistem Perekonomian Dengan Tiga Sektor Produksi

Alokasi Output Struktur Input			Permintaan Antara			Permin taan Akhir	Jumlah Output
			Sektor Produksi				
			1	2	3		
Input Antara	Sektor Produksi	1 2 3	X_{11} X_{21} X_{31}	X_{12} X_{22} X_{32}	X_{13} X_{23} X_{33}	F_1 F_2 F_3	X_1 X_2 X_3
Input Primer			V_1	V_2	V_3		
Jumlah Input			X_1	X_2	X_3		

Isian sepanjang baris pada Tabel 2.1. memperlihatkan bagaimana output dari suatu sektor dialokasikan, yaitu sebagian untuk memenuhi permintaan antara (digunakan dalam sistem produksi) dan sebagian lainnya untuk memenuhi permintaan akhir (digunakan di luar sistem produksi). Sedangkan isian sepanjang kolomnya menunjukkan pemakaian input antara (input dari dalam sistem produksi/sektor endogen) dan input primer (input dari luar sistem produksi/sektor eksogen) oleh suatu sektor.

Berdasarkan cara pengisian angka-angka ke dalam sistem matriks, maka dapat dilihat bahwa angka-angka setiap sel pada tabel tersebut memiliki makna ganda. Angka dari suatu sel pada transaksi antara, misalnya x_{12} , jika dilihat menurut baris maka angka tersebut menunjukkan besarnya output sektor 1 yang dialokasikan untuk memenuhi permintaan antara di sektor 2. Sedangkan jika dilihat menurut kolom, maka x_{12} menunjukkan besarnya input yang digunakan oleh sektor 2 yang berasal dari sektor 1.

Dari gambaran tersebut tampak bahwa penyusunan angka-angka dalam bentuk matriks memperlihatkan suatu jalinan yang saling mengait dari berbagai kegiatan antar sektor. Sebagai ilustrasi dapat diamati proses pengalokasian output pada Tabel 2.1. Output sektor 1 pada tabel tersebut adalah sebesar X_1 dan didistribusikan sepanjang baris sebesar x_{11} , x_{12} , dan x_{13} masing-masing untuk memenuhi permintaan antara sektor 1, 2 dan 3, sedangkan sisanya sebesar F_1 digunakan untuk memenuhi permintaan akhir. Begitu juga dengan output sektor 2 dan 3 masing-masing sebesar X_2 dan X_3 , dapat dilihat dengan cara yang sama dalam proses pengalokasian output sektor 1. Alokasi output pada masing-masing sektor tersebut dalam bentuk persamaan aljabar dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}x_{11} + x_{12} + x_{13} + F_1 &= X_1 \\x_{21} + x_{22} + x_{23} + F_2 &= X_2 \dots(1) \\x_{31} + x_{32} + x_{33} + F_3 &= X_3\end{aligned}$$

Atau dalam bentuk persamaan umum dapat dituliskan sebagai:

$$\sum_{j=1}^3 x_{ij} + F_i = X_i \quad \text{untuk semua } i = 1, 2, 3 \dots (2)$$

Dimana:

x_{ij} = output sektor i yang digunakan sebagai input sektor j

F_i = permintaan akhir terhadap sektor i

X_i = jumlah output sektor i

Apabila angka-angka dibaca menurut kolom, khususnya pada transaksi antara, maka angka pada kolom (sektor) tertentu menunjukkan berbagai input yang diperlukan dalam proses produksi pada sektor tersebut. Apabila Tabel 2.B. 1 digunakan sebagai ilustrasi, maka persamaan aljabar untuk input yang digunakan oleh masing-masing sektor dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}x_{11} + x_{21} + x_{31} + V_1 &= X_1 \\x_{12} + x_{22} + x_{32} + V_2 &= X_2 \dots\dots\dots (3) \\x_{13} + x_{23} + x_{33} + V_3 &= X_3\end{aligned}$$

Atau dalam bentuk persamaan umum dapat dituliskan sebagai:

$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} + V_j = X_j; \text{ untuk semua } j = 1, 2, 3 \dots (4)$$

Dimana:

V_j = nilai tambah atau input primer sektor j.

Persamaan-persamaan tersebut merupakan persamaan dasar yang sangat penting, khususnya untuk melakukan analisis perekonomian dengan model input-output.

Catatan :

1. Dalam penyusunan tabel I-O, pada tahap awal harus dilakukan terlebih dulu klasifikasi sektor atau pengelompokan barang dan jasa. Tabel I-O dapat dibuat dengan klasifikasi 19 sektor, 66 sektor, 85 sektor, 175 sektor dan sebagainya sesuai kebutuhan dan ketersediaan data.
2. Tabel I-O dapat disajikan dalam 4 jenis transaksi yaitu transaksi atas dasar harga pembeli, transaksi atas dasar produsen, transaksi total (produksi dalam negeri dan impor), dan transaksi domestik (produksi dalam negeri saja).

C. MODEL INPUT-OUTPUT

Dalam model ekonomi makro dikenal istilah pengganda (multiplier) yang dipakai untuk menjelaskan dampak yang dialami suatu variabel endogen akibat terjadinya perubahan pada variabel eksogen. Dalam model I-O multiplier ini dapat disajikan secara simultan dalam bentuk matrik pengganda. Matrik pengganda digunakan untuk melakukan analisis dampak yaitu analisis dampak terhadap Output, Nilai Tambah Bruto, Upah/Gaji dan Tenaga Kerja; dan analisis keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward dan backward linkages*).

Matrik pengganda dihitung dari matrik koefisien input antara (A) yang dapat diturunkan dari tabel transaksi total atau tabel transaksi domestik. Sebagai contoh akan digunakan tabel transaksi domestik atas dasar harga produsen.

Tabel 2.2. Transaksi Domestik Atas dasar harga Produsen

Sektor	1	2	3
1	44	191	53
2	27	175	143
3	25	142	245
Jumlah Input Antara	96	508	441
Nilai Tambah Bruto	410	545	713
Jumlah Input	506	1053	1154

Koefisien input antara (a_{ij}) adalah hasil bagi antara masing masing komponen input antara (x_{ij}) dengan jumlah output. Sesuai dengan prinsip tabel I-O, jumlah output sama dengan jumlah inputnya (X_j) maka $a_{ij} = x_{ij} / X_j$. Koefisien input antara dari tabel di atas adalah :

Tabel 2.3. Matrik Koefisien Input Domestik (A^d)

Sektor	1	2	3
1	0,0868	0,1813	0,0459
2	0,0538	0,1661	0,1251
3	0,0500	0,1351	0,2144

Matrik pengganda adalah matrik kebalikan (*inverse matrix*) dari matrik ($I - A^d$) yang diperoleh dengan mengurangkan matrik I dengan matrik A^d . Matrik pengganda $(I - A^d)^{-1}$ yang diperoleh :

Tabel 2.4. Matrik Pengganda
 $(I - A^d)^{-1}$

Sektor	1	2	3
1	1.1162	0.2600	0.1067
2	0.0848	1.2507	0.2041
3	0.0856	0.2317	1.3148

Selanjutnya matrik pengganda ini akan digunakan dalam model analisis I-O berikut ini.

1. Dampak terhadap Output

Dalam model I-O, output memiliki hubungan timbal balik dengan permintaan akhir. Artinya jumlah output yang dapat diproduksi tergantung dari jumlah permintaan akhirnya. Namun demikian dalam keadaan tertentu, output justru yang menentukan besarnya permintaan akhir.

Output dalam model I-O dapat dihitung dengan rumus:

$$X_{FT} = (I - A)^{-1} (F - M) \quad \dots \quad (5)$$

$$X_{FD} = (I - A^d)^{-1} F^d \quad \dots \quad (6)$$

Rumusan ini sekaligus mencerminkan bahwa pembentukan output (X) dipengaruhi oleh permintaan akhir ($F-M$) atau F^d , di mana M adalah impor yang disediakan untuk memenuhi permintaan antara dan permintaan akhir.

Output yang terbentuk sebagai akibat dari permintaan akhir total (X_{FT}) akan sama dengan output yang terbentuk sebagai akibat permintaan akhir domestik (X_{FD}). Dalam banyak analisis yang lebih sering digunakan adalah X_{FD} .

Penggunaan persamaan (5) dan (6) antara lain untuk menghitung porsi output yang terbentuk sebagai dampak dari masing-masing komponen permintaan akhir dan memperkirakan output yang terbentuk sebagai dampak permintaan akhir yang diproyeksikan.

Dengan mempergunakan matrik pengganda di atas, dapat dihitung dampak kenaikan permintaan akhir terhadap output.

Kenaikan satu unit F_1 (permintaan akhir produk sektor 1) akan menimbulkan dampak terhadap :

X_1 (Output sektor 1) sebesar 1,1162

X_2 (Output sektor 2) sebesar 0,0848

X_3 (Output sektor 3) sebesar 0,0856

Kenaikan satu unit F_2 (permintaan akhir produk sektor 2) akan menimbulkan dampak terhadap :

X_1 (Output sektor 1) sebesar 0,2600

X_2 (Output sektor 2) sebesar 1,2507

X_3 (Output sektor 3) sebesar 0,2317

Kenaikan satu unit F_3 (permintaan akhir produk sektor 3) akan menimbulkan dampak terhadap :

X_1 (Output sektor 1) sebesar 0,1067

X_2 (Output sektor 2) sebesar 0,2041

X_3 (Output sektor 3) sebesar 1,3148

Ilustrasi di atas menunjukkan adanya keterkaitan ke belakang (*backward linkages*) dari perubahan permintaan akhir suatu sektor terhadap output seluruh sektor ekonomi.

Bila F_1 , F_2 , dan F_3 masing masing sebesar 128, 304, dan 317 maka output yang terbentuk sebagai dampak permintaan akhir adalah sebagai berikut :

$$X_1 = 1,1162 \times 128 + 0,2600 \times 304 + 0,1067 \times 317 = 255$$

$$X_2 = 0,0848 \times 128 + 1,2507 \times 304 + 0,2041 \times 317 = 456$$

$$X_3 = 0,0856 \times 128 + 0,2317 \times 304 + 1,3148 \times 317 = 498$$

Persamaan (5) dan (6) yang masih bersifat umum tersebut dapat dirinci lagi menjadi beberapa formula sesuai dengan banyaknya komponen permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga (301), pengeluaran konsumsi pemerintah (302), pembentukan modal tetap (303), perubahan stok (304) dan ekspor barang dan jasa (305+306). Andaikan persamaan (6) digunakan dalam analisis, maka pengembangannya akan menjadi lima buah formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_{301} &= (I - A^d)^{-1} F_{301}^d \\ X_{302} &= (I - A^d)^{-1} F_{302}^d \\ X_{303} &= (I - A^d)^{-1} F_{303}^d \\ X_{304} &= (I - A^d)^{-1} F_{304}^d \\ X_{305+306} &= (I - A^d)^{-1} F_{305+306}^d \end{aligned}$$

Dengan

$$X_{FD} = X_{301} + X_{302} + X_{303} + X_{304} + X_{(305+306)}$$

$$X_{301} = \text{Output yang terbentuk akibat dampak pengeluaran konsumsi rumah tangga } (F_{301}^d)$$

- X_{302} = Output yang terbentuk akibat dampak pengeluaran konsumsi pemerintah (F^d_{302})
- X_{303} = Output yang terbentuk akibat dampak pembentukan modal tetap (F^d_{303})
- X_{304} = Output yang terbentuk akibat dampak perubahan stok (F^d_{304})
- $X_{305+306}$ = Output yang terbentuk akibat ekspor ($F^d_{305+306}$)

2. Dampak terhadap Nilai Tambah Bruto

Nilai Tambah Bruto (NTB) adalah input primer yang merupakan bagian dari input secara keseluruhan. Sesuai dengan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan tabel I-O, maka hubungan antara NTB dengan output bersifat linear. Artinya kenaikan atau penurunan output akan diikuti secara proporsional oleh kenaikan dan penurunan NTB. Hubungan tersebut dapat dijabarkan dalam persamaan berikut:

$$V = \hat{V} X \dots\dots (7)$$

dengan

- V = matriks NTB
- \hat{V} = matriks diagonal koefisien NTB
- $X = (I - A^d)^{-1} F^d$ atau $(I - A)^{-1} F$

Isian sel-sel diagonal \hat{V} adalah NTB sektor yang bersangkutan dibagi dengan outputnya, sedangkan sel-sel di luar diagonal adalah 0. Jadi, bentuk matriks \hat{V} adalah:

$$\hat{V} = \begin{pmatrix} v_1 & K & 0 & K & 0 \\ & M & & M & M \\ 0 & K & v_i & K & 0 \\ & M & & M & M \\ 0 & K & 0 & K & v_n \end{pmatrix}$$

dengan

$$\hat{v}_i = \frac{\text{NTB sektor } i}{\text{Output sektor } i}$$

Berdasarkan tabel II.1 dapat dihitung tiap sel matrik diagonal koefisien NTB

Tabel 2.5. Matriks diagonal koefisien NTB

Baris \ kolom	1	2	3
1	0,8103	0	0
2	0	0,5176	0
3	0	0	0,6179

Dengan menggunakan dampak terhadap output yang telah dihitung yaitu $X_1 = 255$, $X_2 = 456$ dan $X_3 = 498$ diperoleh :

$$V_1 = 0,8103 \times 255 = 194$$

$$V_2 = 0,5176 \times 456 = 236$$

$$V_3 = 0,6179 \times 498 = 308$$

3. Dampak terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja

Dalam suatu proses produksi tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peranan cukup penting. Balas jasa atau pengeluaran untuk tenaga kerja oleh produsen merupakan salah satu komponen input primer, yang antara lain berupa upah dan gaji, tunjangan dan bonus.

Definisi tenaga kerja dalam tabel I-O pada dasarnya sama dengan definisi yang digunakan dalam Sensus Penduduk. Dalam banyak analisis makro, tenaga kerja sering juga disebut dengan kesempatan kerja atau lapangan kerja.

Koefisien tenaga kerja (*labor coefficient*) adalah suatu bilangan yang menunjukkan besarnya jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit keluaran (output). Sesuai dengan pengertian ini maka koefisien tenaga kerja dapat dihitung menggunakan persamaan:

$$l_i = \frac{L_i}{X_i} \dots\dots (8)$$

dengan:

- l_i = Koefisien tenaga kerja sektor i
- L_i = Jumlah tenaga kerja sektor i
- X_i = Output sektor i

Sesuai dengan asumsi dasar model I-O, tenaga kerja memiliki hubungan linear dengan output. Hal ini berarti bahwa naik turunnya output di suatu sektor akan berpengaruh terhadap naik turunnya jumlah tenaga kerja di sektor tersebut. Hubungan antara tenaga kerja dengan output sebenarnya

telah digambarkan dalam rumus penghitungan koefisien tenaga kerja pada persamaan (8). Dalam persamaan tersebut koefisien tenaga kerja dihitung dengan rumus $I_i = L_i/X_i$, sehingga dalam hal ini $L_i = I_i X_i$. Jika persamaan terakhir ini diuraikan untuk masing-masing sektor maka diperoleh:

$$\begin{aligned} L_1 &= I_1 X_1 \\ &\vdots \\ L_i &= I_i X_i \quad \dots \quad (9) \\ &\vdots \\ L_n &= I_n X_n \end{aligned}$$

Dalam bentuk matriks, persamaan-persamaan (9) dapat dituliskan sebagai:

$$L = \hat{L} X$$

dengan

L = Matriks jumlah tenaga kerja

$$\hat{L} = \begin{pmatrix} I_1 & K & 0 & K & 0 \\ M & & M & & M \\ 0 & K & I_i & K & 0 \\ M & & M & & M \\ 0 & K & 0 & K & I_n \end{pmatrix}$$

, matriks diagonal koefisien tenaga kerja

X = Output

Sementara itu pada persamaan dampak output, telah pula dikemukakan bahwa output yang terbentuk sebagai akibat permintaan akhir dapat dihitung dengan $X = (I - A^d)^{-1} F^d$. Sehingga jika persamaan ini disubstitusikan ke dalam persamaan (9) akan diperoleh:

$$L = \hat{L} (I - A^d)^{-1} F^d \dots\dots\dots (10)$$

dengan

L = Kebutuhan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh permintaan akhir

\hat{L} = Matriks diagonal koefisien tenaga kerja

$(I - A^d)^{-1} F^d$ = Output yang dipengaruhi permintaan akhir

D. PENGUKURAN DAMPAK EKONOMI PARIWISATA

Dalam analisis dampak pariwisata terhadap kinerja ekonomi daerah dan nasional, permintaan akhir menjadi faktor eksogen yang mendorong penciptaan nilai produksi barang dan jasa. Dalam kaitannya dengan dampak pariwisata, faktor pendorong (*exogenous variable*) berupa konsumsi wisatawan mancanegara (*inbound*), wisatawan nusantara (wisnus), wisatawan Indonesia ke luar negeri (*outbound*) terhadap produk dalam negeri, investasi pariwisata dan pengeluaran pemerintah untuk pariwisata (APBN) serta lembaga-lembaga nirlaba yang ikut andil dalam kegiatan pariwisata. Dengan model IO dampak kepariwisataan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Dampak Terhadap Output

Pengeluaran konsumsi pariwisata akan berdampak terhadap penciptaan nilai produksi barang dan jasa sektoral. Hubungan antara konsumsi kepariwisataan dengan nilai output dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$X_i = (I-A^d)^{-1} \cdot W_i \dots\dots\dots (11)$$

dimana:

- X_i = output yang diciptakan akibat konsumsi kepariwisataan.
- (I-A^d)⁻¹ = invers matriks berfungsi sebagai koefisien regresi dalam model.
- W_i = konsumsi kepariwisataan, mencakup 1) inbound, 2) outbound, 3) wisnus, 4) investasi pariwisata dan 5) lainnya (pemerintah dan nirlaba).
- i = 1,2,3,4,5.

Persamaan (11) mendasarkan hubungan linear antara permintaan akhir, dalam hal ini konsumsi pariwisata dengan output. Semakin besar jumlah permintaan terhadap produk barang dan jasa maka output yang harus disediakan harus bertambah mengikuti matriks pengganda sebagai koefisien regresinya. Persamaan di atas menghasilkan nilai output barang dan jasa setiap sektor akibat dari konsumsi pariwisata. Dapat diketahui dampak output akibat masing-masing komponen konsumsi pariwisata terhadap sektor-sektor ekonomi. Misalkan, pengeluaran wisman di Indonesia akan berdampak terhadap

penambahan nilai produksi barang dan jasa. Demikian pula akibat wisnus, investasi pariwisata dan pengeluaran pemerintah untuk pengembangan pariwisata.

2. Dampak Terhadap Nilai Tambah Bruto

Nilai tambah bruto merupakan bagian dari nilai output sektor ekonomi. Sebagai balas jasa atas faktor produksi, nilai tambah bruto mencakup upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan, pajak tak langsung dan subsidi. Sebagaimana model IO untuk menghasilkan nilai output akibat konsumsi pariwisata, nilai tambah yang diciptakan juga berbanding lurus dengan permintaan atau konsumsi kepariwisataan. Formulasi yang menunjukkan hubungan tersebut adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_i &= v (I-A^d)^{-1} \cdot W_i \\ &= v \cdot X_i \dots\dots\dots(12) \end{aligned}$$

dimana:

- V_i = nilai tambah bruto karena dampak konsumsi kepariwisataan.
- v = matriks diagonal koefisien nilai tambah bruto, yaitu rasio antara nilai tambah bruto sektor tertentu dengan outputnya.
- i = 1) inbond, 2) outbond, 3) wisnus, 4) investasi pariwisata dan 5) lainnya (pemerintah dan nirlaba).

Persamaan (12) menunjukkan hubungan searah antara nilai tambah bruto dengan nilai outputnya. Ini juga berarti bahwa terdapat hubungan

antara konsumsi kepariwisataan dengan penciptaan nilai tambah sektor-sektor ekonomi, yaitu pengeluaran wisman, wisnus, investasi pariwisata dan lainnya.

3. Dampak Terhadap Upah/Gaji

Salah satu komponen nilai tambah bruto adalah upah/gaji. Dari model IO dapat diturunkan hubungan antara upah/ gaji dengan konsumsi kepariwisataan. Hubungan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} G_j &= g_j (I-A^d)^{-1} \cdot W_i \\ &= g_j \cdot X_i \end{aligned} \quad \dots\dots\dots (13)$$

dimana:

G_j = Upah/gaji akibat konsumsi kepariwisataan.

g_j = matriks diagonal koefisien upah/gaji, yaitu rasio antara upah/gaji sektor tertentu dengan outputnya.

Persamaan ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara konsumsi kepariwisataan dengan upah/gaji para pekerja pada sektor-sektor ekonomi.

4. Dampak terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja

Dalam industri pariwisata , tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memiliki peranan cukup penting.

Sesuai dengan asumsi dasar model I-O, tenaga kerja industri pariwisata memiliki hubungan linear dengan output. Hubungan antara tenaga kerja dengan output dinyatakan dalam koefisien tenaga kerja dengan rumus $L_i = L_i/X_i$, sehingga

$$L_i = L_i X_i \dots\dots\dots (14)$$

L_j = Kebutuhan tenaga kerja akibat konsumsi kepariwisataan.

l_j = matriks diagonal koefisien tenaga kerja, yaitu rasio antara tenaga kerja sektor tertentu dengan outputnya.

Persamaan ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara konsumsi kepariwisataan dengan kesempatan kerja pada sektor-sektor ekonomi.

5. Dampak Terhadap Pajak Tidak Langsung

Komponen nilai tambah bruto yang lain adalah pajak tidak langsung. Dari model IO dapat diturunkan hubungan antara pajak tidak langsung dengan konsumsi kepariwisataan. Hubungan tersebut dapat disajikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} P_j &= p_j (I-A^d)^{-1} \cdot W_i \\ &= p_j \cdot X_i \dots\dots\dots (15) \end{aligned}$$

dimana:

P_j = pajak tidak langsung akibat konsumsi kepariwisataan.

p_j = matriks diagonal koefisien pajak tidak langsung, yaitu rasio antara pajak tidak langsung dari sektor tertentu dengan outputnya.

Persamaan ini mengindikasikan adanya keterkaitan antara konsumsi kepariwisataan dengan besarnya penerimaan pajak tidak langsung oleh pemerintah dari sektor-sektor ekonomi.

Simulasi penghitungan dampak pariwisata terhadap perekonomian akan diuraikan secara lengkap pada bab IV.

BAB III

DATA YANG DIBUTUHKAN

Dalam mengidentifikasi kebutuhan data bagi penyusunan nesparda, perlu dipahami bahwa nesparda dimaksudkan untuk menggambarkan pariwisata dalam konteks ekonomi makro pada level regional. Oleh karena itu nesparda harus mencakup informasi:

- Agregat makro ekonomi yang menunjukkan besaran dan peran pariwisata dalam ekonomi daerah, seperti nilai tambah industri pariwisata daerah.
- Data rinci mengenai pengeluaran wisatawan dan seberapa besar konsumsi wisatawan dipenuhi oleh industri di dalam daerah yang bersangkutan dan barang impor dari daerah lain atau luar negeri.

- Produksi dari industri pariwisata.
- Kaitan antara data ekonomi dan indikator fisik industri pariwisata.
- Data penting lain yang dibutuhkan

A. PENGELUARAN WISATAWAN

Dari sisi pandang ekonomi, seluruh kegiatan wisatawan adalah mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya dalam melakukan perjalanan baik sendiri maupun rombongan. Menurut ketentuan World Tourism World Tourism Organization (WTO), merekomendasikan bahwa pengeluaran untuk konsumsi wisatawan :

- Tidak hanya mencakup :
 - o Pengeluaran yang menggunakan uang wisatawan sendiri.
 - o Pengeluaran selama perjalanan dan berada di tempat tujuan.
- Tetapi juga :
 - o Pengeluaran yang dilakukan oleh pihak lain atas nama wisatawan, misalnya oleh kantor tempat wisatawan bekerja.
 - o Pengeluaran sebelum dan sesudah melakukan perjalanan, yang terkait dengan kepergian wisatawan

Pembelian barang tahan lama walaupun tidak untuk digunakan segera atau sendiri oleh wisatawan, tetap dimasukkan sebagai pengeluaran konsumsi, selama barang yang dibeli tersebut bukan untuk diperdagangkan. Barang tahan lama adalah barang yang digunakan berulang kali atau terus menerus, biasanya dalam waktu lebih dari satu tahun.

Karena umurnya lama, maka barang yang dibeli bisa digunakan hanya selama bepergian (*single purpose*) atau digunakan juga di luar waktu bepergian (*multipurpose*). Untuk barang *single purpose*, pembelian bisa dilakukan sebelum bepergian, namun tetap dicatat sebagai pengeluaran untuk bepergian. Sedangkan untuk barang *multipurpose*, hanya pembelian yang dilakukan selama bepergian yang dicatat, kecuali barang yang nilainya relatif kecil atau untuk kado dapat dibeli sebelum bepergian.

Jenis pengeluaran khusus yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data :

- Dicatat sebagai pengeluaran wisatawan
 - o Sewa kendaraan dan barang.
 - o Biaya tiket dan jasa yang tidak jadi digunakan namun tidak dapat diuangkan kembali.
 - o Biaya pengurusan visa
 - o Biaya asuransi perjalanan.
- Tidak dicatat sebagai pengeluaran wisatawan
 - o Pembelian barang dan jasa keperluan bisnis.
 - o Pembelian barang modal.
 - o Pembelian barang sangat berharga.

Mengingat wisatawan tidak melaporkan pengeluarannya kepada otoritas apapun, maka data pengeluaran wisatawan sulit diperoleh secara lengkap, akurat dan tepat waktu. Data pengeluaran wisatawan hanya dapat diperoleh dari berbagai survei. Pada tingkat nasional, telah dilakukan beberapa jenis survei untuk mendapatkan data tersebut. Untuk tingkat daerah

perlu dilakukan survei tersendiri dengan atau tanpa terintegrasi dengan survei nasional.

Pada tingkat nasional, pengumpulan data konsumsi adalah sebagai berikut :

1. Pengeluaran Wisatawan Domestik

Pengumpulan data jumlah dan pengeluaran wisnus/domestik tingkat nasional selama ini dilakukan dengan pendekatan rumah tangga melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tiga tahun oleh BPS, dengan metode survei sampel. Jumlah sampel untuk kegiatan tahun 2001 adalah sekitar 11.000 responden. *Pengeluaran yang dicatat dalam pengumpulan data wisatawan nusantara adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia.* Adapun rincian tentang pengeluaran yang ditanyakan mencakup biaya-biaya antara lain untuk:

- a. Akomodasi
- b. Makan dan minum
- c. Angkutan, baik angkutan darat, angkutan air, angkutan udara maupun jasa penunjang angkutan
- d. Paket perjalanan
- e. Pemandu wisata (pramuwisata)
- f. Pertunjukan seni
- g. Jasa hiburan rekreasi
- h. Jasa pariwisata lainnya
- i. Cinderamata atau oleh-oleh
- j. Belanja
- k. Lain-lain

Semua rincian biaya di atas adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk selama melakukan perjalanan, baik yang dibayar sendiri maupun yang dibayar oleh pihak lain. Di sini juga termasuk kewajiban-kewajiban yang harus dibayar oleh penduduk yang melakukan perjalanan yang sudah menikmati barang atau jasa selama dalam perjalanan namun pembayaran atas barang atau jasa tersebut dilakukan setelah selesai melakukan perjalanan. Bahkan secara konsep pengeluaran perjalanan juga termasuk pengeluaran yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan tetapi akan digunakan dalam perjalanan, seperti membeli film untuk kamera yang akan digunakan dalam perjalanan. Dalam hal ini termasuk juga pengeluaran yang dilakukan setelah melakukan perjalanan yang masih berkaitan dengan perjalanan yang telah dilakukan, seperti biaya cuci cetak film.

Sedikit berbeda dengan konsep untuk tingkat nasional, di tingkat daerah/propinsi *wisnus adalah penduduk yang melakukan perjalanan di dalam propinsi itu sendiri*, sedangkan yang melakukan perjalanan ke luar propinsi di wilayah Indonesia, dikategorikan sebagai *outbound tourist* yang akan dijelaskan selanjutnya.

2. Pengeluaran Wisatawan ke Luar Negeri (Outbound)

Data pengeluaran penduduk Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk tingkat nasional diperoleh dengan survei yang dilakukan di beberapa pintu keluar (outbound survey) yang dilakukan oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mewawancarai mereka saat tiba di Indonesia dan menanyakan berbagai keterangan mengenai perjalanan mereka termasuk biaya perjalanan mereka di luar negeri.

Jenis pengeluaran yang ditanyakan dalam survei outbound ini hampir sama dengan survei wisnus. Namun guna pengukuran dampak pariwisata terhadap ekonomi, hanya pengeluaran sebelum dan sesudah perjalanan yang diperhitungkan.

Konsep wisatawan outbound untuk tingkat daerah dibagi menjadi dua kategori yaitu; (1) *penduduk propinsi tersebut yang melakukan perjalanan ke luar propinsi bersangkutan*, (2) *penduduk propinsi tersebut yang melakukan perjalanan ke luar negeri*. Dengan demikian pelaksanaan surveynya menjadi lebih rinci dibanding untuk nasional, baik mengenai jumlah maupun pengeluarannya.

3. Pengeluaran Wisatawan Mancanegara (Inbound)

Untuk mengetahui rata-rata pengeluaran dan lama tinggal wisman tingkat nasional di Indonesia dilakukan pendekatan melalui *Passenger Exit Survey* (PES). Untuk melengkapi keakuratan hasil survei tersebut juga dilakukan studi mendalam ke biro-biro perjalanan wisata yang menyelenggarakan paket inbound guna lebih mencermati distribusi pengeluaran wisman. Nilai perkiraan pengeluaran wisman, yang juga merupakan penerimaan devisa dapat dihitung dengan mengalikan jumlah wisman dengan rata-rata pengeluaran per kunjungan.

Pengeluaran wisman yang ditanyakan adalah semua pengeluaran mereka selama berada di Indonesia atas barang dan jasa yang mereka terima, tidak termasuk pengeluaran untuk investasi. Komponen pengeluaran dalam PES antara lain untuk:

- a. Akomodasi
- b. Penerbangan domestik

- c. Transpor lokal
- d. Makanan dan minuman
- e. Pesiar
- f. Cinderamata
- g. Paket tur lokal
- h. Kesehatan dan kecantikan
- i. Pemandu wisata
- j. Lainnya

Seperti halnya pada pencatatan outbound tourist, di tingkat daerah pencatatan inbound tourist juga dibagi menjadi dua kategori yaitu: (1) penduduk Indonesia di luar propinsi bersangkutan yang datang ke dalam propinsi bersangkutan (2) penduduk luar negeri yang datang ke propinsi bersangkutan. Dengan demikian pencatatan jumlah dan pengeluarannya pun dibagi ke dalam dua kelompok tersebut.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk tingkat nasional wisatawan dibagi menjadi 3 kategori yaitu wisnus, wisman/inbound dan outbound tourist. Sedangkan di tingkat daerah/propinsi dibagi menjadi lima kategori yaitu:

- (1) wisnus; penduduk propinsi yang melakukan perjalanan di dalam propinsi tersebut,
- (2) Inbound nasional; penduduk Indonesia di luar propinsi yang melakukan perjalanan ke dalam propinsi bersangkutan
- (3) Indound internasional, penduduk luar negeri yang melakukan perjalanan ke dalam propinsi bersangkutan

- (4) Outbound nasional; penduduk propinsi bersangkutan yang melakukan perjalanan ke luar propinsi di Indonesia
- (5) Outbound internasional; penduduk propinsi bersangkutan yang melakukan perjalanan ke luar negeri

B. PENYEDIAAN BARANG DAN JASA BAGI PARIWISATA

Wisatawan dapat mengkonsumsi barang dan jasa apapun yang diproduksi oleh berbagai industri. Oleh sebab itu sangat tidak memadai bila hanya memfokuskan pengumpulan data pada barang dan jasa tertentu dan mengabaikan yang lain. Tidak mudah untuk menentukan tolok ukur apakah suatu barang dan jasa lebih banyak dikonsumsi wisatawan dan karenanya ada industri yang khusus menyediakan kebutuhan wisatawan. Misal, wisatawan tidak selalu dan harus berbelanja di pusat perbelanjaan dan pusat perbelanjaan tidak hanya melayani wisatawan.

Meskipun demikian, sejumlah barang dan jasa masih dapat diidentifikasi sebagai barang dan jasa yang lebih banyak dikonsumsi wisatawan dibandingkan yang lain. Besarnya permintaan akan barang dan jasa tersebut menggambarkan besarnya penawaran bagi wisatawan oleh industri yang bersangkutan. Barang dan jasa tersebut digolongkan sebagai produk spesifik pariwisata (*tourism specific products*) dan industrinya sebagai industri spesifik pariwisata (*tourism specific activities*).

Contoh produk spesifik pariwisata :

- Angkutan Penumpang.
- Hotel dan jasa akomodasi lain.
- Restoran.

- Biro Perjalanan Wisata.
- Taman / Tempat Rekreasi.

Rangkuman

Apa yang telah dibahas di atas dapat dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 3.1. PENYEDIAAN BARANG DAN JASA

Jenis Produk		Ciri Produk	Contoh
Produk Spesifik	Produk Berkarakteristik Pariwisata	Bila tidak ada pariwisata, produk ini tidak akan ada di pasar . Produk ini sangat dibutuhkan wisatawan, bila jumlah wisatawan menurun maka penjualan produk ini menurun juga.	Jasa Biro Perjalanan Wisata, Jasa Pemandu Wisata, bus wisata, hotel
	Produk Terkait Pariwisata	Bila tidak ada pariwisata produk ini masih tetap ada di pasar, karena tidak hanya dibutuhkan wisatawan.	Taxi, angkutan udara, fasilitas rekreasi
Non produk spesifik		Dikonsumsi wisatawan tetapi sangat kecil kaitannya dengan pariwisata.	Baju, pensil, gunting, gelas, obat obatan,

Dengan mempertimbangkan perilaku “demand” wisatawan maka kategori barang dan jasa spesifik pariwisata ini dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu pertama: barang dan jasa berkarakteristik pariwisata yaitu produk barang dan jasa yang sepenuhnya dibutuhkan oleh wisatawan, misalnya cinderamata. Kedua adalah produk barang dan jasa yang berkaitan secara tidak langsung (non-karakteristik) yang juga dibutuhkan oleh wisatawan, seperti angkutan, jasa telekomunikasi. Sementara produk barang

dan jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan bukan karena mereka berwisata disebut barang dan jasa non spesifik- pariwisata.

C. INVESTASI TERKAIT PARIWISATA (PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA)

Investasi merupakan suatu kegiatan menanamkan modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan memperoleh manfaat dan benefit pada masa yang akan datang. Investasi sangat dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi pada lingkup mikro maupun keberlangsungan pembangunan ekonomi suatu negara/ daerah dalam lingkup makro.

Yang dimaksud dengan investasi di sektor pariwisata adalah pengeluaran neto dalam rangka pembentukan modal yang dilakukan oleh institusi atau sektor ekonomi untuk menjalankan proses produksi barang dan jasa bagi wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelaku atau institusi ekonomi tersebut adalah penyedia sekaligus penghasil produk barang dan jasa bagi wisatawan yang terdiri dari dunia usaha atau swasta (termasuk rumah tangga), pemerintah dan badan usaha pemerintah atau BUMN/BUMD.

1. Investasi fisik pariwisata yang bersifat langsung (ditujukan untuk menyediakan jasa bagi wisatawan):
 - a. pembuatan bangunan tempat tinggal (misal untuk homestay).
 - b. bangunan bukan tempat tinggal dan bangunan lainnya yang terkait pariwisata seperti hotel, restoran dan sejenisnya, bangunan perkantoran, bangunan untuk tempat olahraga, rekreasi, hiburan, seni dan budaya dan sebagainya.

2. Investasi fisik pariwisata yang bersifat tidak langsung (untuk memfasilitasi industri pariwisata) :
 - a. pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan pariwisata seperti sarana transportasi jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya,
 - b. pembelian mesin-mesin dan peralatan, kendaraan dan barang modal lainnya yang terkait pariwisata,
 - c. perbaikan besar yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas barang modal atau memperpanjang umur barang modal yang digunakan industri pariwisata.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan investasi pariwisata adalah data nilai penyediaan barang modal domestik maupun impor yang diturunkan dari tabel Input-Output dan PDRB daerah masing-masing khususnya komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Disamping itu sebagai data pelengkap dapat digunakan data investasi yang dikompilasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) dalam bentuk persetujuan investasi berdasarkan fasilitas yang diberikan yang dibedakan menurut asal modal perusahaan yaitu PMA dan PMDN, serta beberapa sumber data lainnya yang mendukung seperti data Statistik Industri Besar dan Sedang yang diterbitkan oleh BPS dan Laporan Neraca dan Laba Rugi Perusahaan BUMN/BUMD, khususnya untuk investasi pariwisata yang dilakukan oleh dunia usaha atau pihak swasta. Untuk penyusunan struktur investasi pariwisata pemerintah dipergunakan data pengeluaran pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Tingkat I seluruh propinsi, dan APBD Tingkat II seluruh kabupaten/kota. Disamping itu dapat dipergunakan pula pengeluaran pembangunan yang berasal dari publikasi

Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Statistik Keuangan Pemerintah Desa, hasil dari survei daftar K1 dan K2 untuk APBD seluruh propinsi dan kabupaten/kota serta daftar K3 untuk desa yang dilakukan oleh BPS.

D. TENAGA KERJA PARIWISATA

Pengumpulan data tenaga kerja pariwisata perlu memperhatikan karakteristik tenaga kerja pariwisata sebagai berikut :

- Sebagian bersifat musiman,
- Sebagian besar pada usaha kecil dan menengah,
- Bersifat padat karya,
- Lebih banyak perempuan.
- Lebih banyak tenaga muda.
- Sebagian bekerja paruh waktu,

Dalam standar penyajian tabel I-O, banyaknya tenaga kerja dirinci menurut sektor ekonomi secara umum. Rincian ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam standar penyajian Nesparda, karena struktur ketenagakerjaan harus dikaitkan langsung dengan kepariwisataan untuk mengetahui daya serap tenaga kerja tiap-tiap sektor yang memasok kebutuhan kepariwisataan. Oleh karena itu perlu dilakukan survei khusus untuk memenuhi kebutuhan data tenaga kerja ini.

E. PENGELUARAN LAINNYA TERKAIT PARIWISATA

Pengeluaran lainnya terkait pariwisata mencakup:

1. Pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah
 - pengeluaran promosi,
 - pembinaan
 - pengeluaran lainnya yang bersifat non investasi atau modal.
2. Pengeluaran yang dilakukan oleh dunia usaha
 - pengeluaran promosi dan periklanan
 - pengeluaran lainnya terkait pariwisata.

Secara garis besar pengeluaran pemerintah ini akan tergambar pada belanja barang dalam pengeluaran rutin, termasuk balas jasa bagi pegawai dan pengeluaran untuk pembinaan pegawai yang bergerak di sektor pariwisata. Sumber data yang digunakan dalam menyusun pengeluaran pemerintah terkait pariwisata adalah pengeluaran rutin APBN, pengeluaran rutin APBD Tingkat I seluruh propinsi dan APBD Tingkat II seluruh kabupaten/kota. Disamping itu, data yang digunakan juga berasal dari publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi yang mencakup pengeluaran rutin APBD Tingkat I seluruh propinsi, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang mencakup pengeluaran rutin APBD Tingkat II seluruh kabupaten/kota, serta Statistik Keuangan Pemerintah Desa yang mencakup pengeluaran rutin dari pemerintahan desa, yang semuanya diterbitkan oleh BPS.

F. RANGKUMAN KEBUTUHAN DATA

Tabel 3.2. Sumber dan Frekuensi Pengumpulan Data

JENIS DATA		SUMBER DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN
(1)		(2)	(3)
1.	Wisatawan Mancenagera		
	a. Jumlah wisman/tamu asing	Laporan statistik keimigrasian dan hasil pengolahan E/D Card Survei khusus daerah	Bulanan
	b. Pengeluaran Wisman	Passenger Exit Survey (PES) di pintu masuk Survei khusus daerah	Dua kali dalam satu tahun yaitu pada peak season dan low season.
2.	Wisatawan Nusantara		
	a. Jumlah Wisnus	Susenas Modul Perjalanan Survei khusus daerah	Tiga tahun sekali atau setahun sekali?
	b. Pengeluaran Wisnus	Susenas Modul Perjalanan Survei khusus daerah	Tiga tahun sekali atau tahunan
3.	Outbound		
	a. Jumlah Outbound	Laporan statistik keimigrasian dan hasil pengolahan E/D Card Survei khusus daerah	Bulanan
	b. Pengeluaran Outbound	Survei Outbound Survei khusus daerah	Satu tahun sekali, tidak memperhatikan "low season" dan "peak season"

4.	Pengeluaran Pemerintah		
	a. Pusat	APBN Dept Budpar	Tahunan
	b. Daerah	APBD Dinas Pariwisata Daerah	Tahunan
5.	Investasi		
	a. Pemerintah	APBN Sektoral/Departemental dan APBD	Tahunan
	b. Dunia Usaha	a. Untuk yang menggunakan fasilitas PMA/PMDN bisa diperoleh melalui BKPM/BKPM	Tahunan
		b. Untuk non fasilitas diperoleh melalui survei khusus daerah	Tahunan
6.	Tenaga Kerja		
	a. Hotel dan Akomodasi	a. VHTL b. Survei khusus daerah	Tahunan
	b. Jasa Pariwisata lainnya	a. Sakernas	Tahunan
		b. Survei lapangan	Tahunan
7.	Struktur Ongkos	Survei Khusus Daerah	Tahunan
8.	Indikator Pariwisata Lainnya	Dinas Pariwisata Daerah dan Instansi terkait lainnya.	Tahunan

Tabel 3.3. Metode Pengumpulan Data

JENIS DATA		METODOLOGI	PERMASALAHAN
(1)		(4)	(5)
1.	Wisatawan Mancenagera		
	a. Jumlah wisman	Pengumpulan data dilakukan secara lengkap	Koordinasi dengan Imigrasi
	b. Pengeluaran Wisman	Sampel, proporsional terhadap jumlah kedatangan (populasi) per pintu masuknya. Dilakukan di beberapa pintu masuk	Data akan representatif, bila jumlah sampel tidak terlalu kecil
2.	Wisatawan Nusantara		
	a. Jumlah Wisnus	Sampel, pendekatan rumahtangga perjalanan	Data akan representatif, bila jumlah sampel tidak terlalu kecil. Estimasi mungkin hanya untuk beberapa karakteristik
	b. Pengeluaran Wisnus	Sampel, pendekatan rumahtangga perjalanan	Bila referensi waktu yang digunakan selama 3 bulan yang lalu, sangat sulit bagi responden untuk mengingat lagi pengeluaran mereka selama dalam perjalanan. Data tidak memadai
3.	Outbound		
	a. Jumlah Outbound	Pengumpulan data hanya dilakukan di beberapa pintu keluar	Sulit mendapatkan data yang memadai, lengkap dan tersedia menurut negara tujuan
	b. Pengeluaran Outbound	Sampel, pengumpulan data dengan wawancara dan dapat dicoba dengan metode mailing system	Bila sampel terlalu kecil, tidak akan merata mewakili seluruh karakteristik outbound

4.	Pengeluaran Pemerintah		
	a. Pusat	Pengumpulan data sekunder secara lengkap	APBN Pariwisata tidak terinci seperti dalam klasifikasi yang ada dalam tabel Nesparda
	b. Daerah	Pengumpulan data sekunder secara lengkap	Rincian dalam APBD tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dalam Nesparda
5.	Investasi		
	a. Pemerintah	Pengumpulan data sekunder secara lengkap	Sulit untuk membedakan investasi yang benar-benar untuk pariwisata dan yang berkaitan dengan pariwisata
	b. Dunia Usaha	Pengumpulan data sekunder secara lengkap	Sulit untuk mendapatkan data realisasi investasi, yang tersedia adalah data investasi yang disetujui
6.	Tenaga Kerja		
	a. Hotel dan Akomodasi	Sensus Lengkap	Tidak ada masalah
	b. Industri Pariwisata lainnya	Survei Sampel	Bila dengan pendekatan rumah tangga, sehingga data yang diperoleh adalah jumlah orang, bukan jumlah kesempatan kerja di sektor pariwisata
7.	Struktur Ongkos	Survei sampel atau sensus	Diperlukan desain kuesioner yang spesifik untuk tiap jenis industri.
8.	Indikator Pariwisata Lainnya	Pengumpulan data sekunder secara lengkap melalui Dinas atau Instansi terkait atau survei langsung ke responden	Tidak ada "law inforcement" bagi usaha pariwisata untuk melaporkan kegiatannya ke Instansi pembinaanya.

BAB IV

SIMULASI PENGHITUNGAN DAMPAK GANDA

Untuk melakukan penghitungan dampak ganda pariwisata terhadap perekonomian daerah, daerah perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Sudah memiliki/menyusun Tabel Input - Output (I-O) yang up to date.
2. Memahami analisis model I-O
3. Berusaha menyusun Tabel I-O yang mengakomodasi kepentingan pariwisata dengan merinci lebih detil sektor yang terkait pariwisata.
4. Memiliki data pariwisata dari sisi demand (wisatawan dan investasi serta promosi pariwisata). Jika tidak ada maka harus melakukan survei khusus mengenai pengeluaran wisatawan dan investasi di sektor pariwisata.

5. Melakukan konversi jenis pengeluaran wisatawan ke jenis produk/ sektor dalam tabel I-O dan menentukan rasionya berdasarkan survei khusus.

Konversi menunjukkan produk apa saja yang dikonsumsi wisatawan untuk tiap jenis pengeluaran. Jenis produk ini diperoleh dari survei pengeluaran wisatawan, seperti Passenger Exit Survey, Survey Outbound dan Survey Wisnus. Selanjutnya jenis produk ini diklasifikasikan sesuai dengan jenis produk dalam Tabel Input – Output. Namun bila daerah menghadapi kendala lapangan yang tidak memungkinkan merinci semua jenis produk yang dikonsumsi wisatawan, maka untuk tiap jenis pengeluaran, dengan asumsi tertentu, dapat **diperkirakan** jenis produk produk terkait dan rasionya seperti **contoh** yang tercantum pada tabel di bawah ini. Rasio tersebut menunjukkan berapa persen dari suatu jenis pengeluaran wisatawan yang dialokasikan untuk produk tertentu.

A. KONVERSI PENGELUARAN WISMAN

Tabel 4.1
Contoh Tabel Konversi Jenis Pengeluaran Wisman

Jenis Pengeluaran	Jenis Produk / sub sektor dalam Tabel I-O	Rasio(%)
Akomodasi	Jasa Perhotelan	100,00
Penerbangan Domestik	Jasa Angkutan Udara	100,00
Transportasi Lokal	Jasa Angkutan Kereta Api	25,51
	Jasa Angkutan Jalan Raya	30,36
	Jasa Angkutan Laut	8,81
	Jasa Angkutan Sungai dan Danau	13,57
	Jasa Penunjang Angkutan	21,73

Makanan dan Minuman	Buah-Buahan Daging olahan dan awetan Makanan & minuman terbuat dari susu Buah dan sayur olahan & awetan Roti, biskuit dan lainnya Makanan lainnya Minuman beralkohol Minuman tak beralkohol Rokok Jasa Perdagangan Jasa Restoran	Dari Hasil Survey
Hiburan	Jasa Hiburan, Rekreasi & Kebud. Swasta	100,00
Pesiar	Jasa Angkutan Jalan Raya Jasa Hiburan, Rekreasi & Kebud. Swasta	19,23 80,77
Cinderamata	Barang-barang dari kulit Perabot rumah tangga terbuat dari kayu, bambu & rotan Brg lainnya dari kayu, gabus, bambu dan rotan Keramik dan barang-barang dari tanah liat Barang-Barang Perhiasan Jasa Perdagangan Jasa Hiburan, Rekreasi & Kebud. Swasta	Dari Hasil Survey
Paket Tur Lokal	Jasa Penunjang Angkutan Jasa Hiburan, Rekreasi & Kebud. Swasta	Dari Hasil Survey
Kesehatan dan Kecantikan	Obat-obatan Jasa Kesehatan Pemerintah Jasa Kesehatan Swasta	Dari Hasil Survey
Pemandu Wisata	Jasa Hiburan, Rekreasi & Kebud. Swasta	Dari Hasil Survey

Belanja	Minuman beralkohol Minuman tak beralkohol Rokok Tekstil Tekstil jadi kecuali pakaian Barang-barang rajutan Pakaian jadi Barang-barang dari kulit Alas kaki Perabot rt terbuat dari kayu, rotan, bambu & rotan Barang lainnya dari kayu, gabus, bambu dan rotan Barang anyaman kecuali terbuat dari plastik Keramik dan barang-barang dari tanah liat Barang-Barang Perhiasan Jasa Perdagangan Jasa Hiburan, Rekreasi & Kebud. Swasta	Dari Hasil Survey
Pendidikan	Barang cetakan Jasa Pendidikan Pemerintah Jasa Pendidikan Swasta	Dari Hasil Survey
Lainnya	Jasa Komunikasi Jasa Bank Jasa Lembaga Keuangan Lainnya Yang tidak termasuk dimanapun	Dari Hasil Survey

Pada tabel konversi terlihat pengeluaran untuk akomodasi dan penerbangan domestik masing masing hanya diwakili oleh satu jenis produk dalam tabel I-O yaitu jasa perhotelan dan jasa angkutan udara. Sedangkan pengeluaran wisman untuk makanan dan minuman diwakili oleh 11 jenis produk dan belanja oleh 16 jenis produk. Jenis produk apa yang mewakili harus ditentukan dengan cermat agar tidak terlewat. Misalnya dalam menentukan produk apa yang masuk pengeluaran cinderamata dan apa yang masuk belanja (hasil dari survey khusus).

Nilai tiap jenis pengeluaran didistribusikan ke tiap jenis produk yang mewakilinya secara proporsional sesuai dengan rasio antara nilai tiap jenis produk dengan nilai tiap jenis pengeluaran yang bersangkutan. Rasio tersebut dihitung dari survei khusus. Ketentuan semacam ini juga berlaku untuk pengeluaran wisatawan nusantara, outbound ke luar negeri dan outbound ke daerah lain.

B. KONVERSI PENGELUARAN WISNUS

Konversi ke jenis produk dalam tabel I-O juga dilakukan bagi pengeluaran wisnus. Jenis produk yang dikonsumsi wisnus untuk makanan dan minuman dan untuk belanja lebih banyak dari pada jenis yang dikonsumsi wisman untuk kedua jenis pengeluaran tersebut. Pengeluaran wisnus untuk makanan dan minuman diwakili oleh 29 jenis produk dan belanja oleh 30 jenis produk. Hal ini disebabkan oleh pola konsumsi wisnus yang lebih berorientasi produk lokal dan tradisi membawa oleh-oleh. Jenis produk apa yang mewakili juga harus ditentukan berdasarkan hasil penelitian/survei khusus agar tidak terlewat atau salah klasifikasi misal antara makanan untuk oleh-oleh dan makanan dimakan di tempat.

Tabel 4.2
Contoh Tabel Konversi Jenis Pengeluaran Wisnus

Jenis Pengeluaran	Jenis Produk dalam Tabel I-O	Rasio (%)
Akomodasi	Jasa Perhotelan	100,00
Angkutan	Jasa Angkutan Kereta Api Jasa Angkutan Jalan Raya Jasa Angkutan Laut Jasa Angkutan Udara Jasa Angkutan Sungai dan Danau Jasa Penunjang Angkutan	23,51 11,57 6,81 28,36 19,73 10,00
Makanan dan Minuman	Jagung Sayur-Sayuran Buah-Buahan Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya Ikan Darat dan Hasil Perairan Darat Udang Daging olahan dan awetan Makanan dan minuman terbuat dari susu Ikan kering dan Ikan asin Ikan olahan dan awetan Minyak Hewani dan minyak Nabati Beras Tepung Terigu Tepung lainnya Roti, biskuit dan lainnya Mie, makaroni dan sejenisnya Gula Biji-bijian kupasan, Coklat dan kembang gula Kopi giling dan kupasan Teh olahan Hasil pengolahan kedelai Makanan lainnya Minuman beralkohol Minuman tak beralkohol	Dari Hasil Survey
Atraksi & Hiburan	Jasa Hiburan, Rekreasi & Kebud. Swasta	100

Paket Perjalanan Wisata	Jasa Penunjang Angkutan Jasa Hiburan, Rekreasi & Kebud. Swasta	17,23 82,77
Cinderamata	Keramik dan barang-barang dari tanah liat Barang-Barang Perhiasan Barang-barang dari kulit Jasa Perdagangan Jasa Hiburan, Rekreasi & Kebud. Swasta	Dari Hasil Survey
Belanja	Jagung Ubi Jalar Umbi-Umbian Lainnya Sayur-Sayuran Sayur-Sayuran Buah-Buahan Ikan Laut dan Hasil Laut Lainnya Ikan Darat dan Hasil Perairan Darat Udang Daging olahan & awetan Buah dan sayur olahan & awetan Ikan kering dan Ikan asin Ikan olahan dan awetan Hasil pengolahan kedelai Makanan lainnya Tekstil Tekstil jadi kecuali pakaian Barang-barang rajutan Pakaian jadi Permadani, tali, dan tekstil lainnya Barang-barang dari kulit Alas kaki Perabot rt dari kayu, rotan, bambu Brg lainnya dari kayu, gabus, bambu dan rotan Brg anyaman kecuali terbuat dari plastik	Dari Hasil Survey
Dokumentasi	Barang kimia lainnya (film) Jasa Perdagangan Jasa Perorangan dan RT (cetak foto)	Dari Hasil Survey

Kesehatan dan Kecantikan	Obat-obatan Barang-barang kosmetik Jasa Perdagangan Jasa Kesehatan Pemerintah Jasa Kesehatan Swasta Jasa Perorangan dan Rumahtangga	Dari Hasil Survey
Pemandu Wisata	Jasa Hiburan, Rekreasi & Kebud. Swasta	100,00
Lainnya	Barang -barang plastik Jasa Komunikasi Jasa Bank dan Lemb. Keu. Lainnya Jasa Perbengkelan yg tdk termasuk dimanapun Barang dan Jasa yg tdk termasuk dimanapun	Dari Hasil Survey

C. CONTOH PENGHITUNGAN DAMPAK PARIWISATA

Pengeluaran konsumsi pariwisata akan berdampak terhadap penciptaan nilai produksi barang dan jasa sektoral. Dalam Pedoman ini akan diberikan contoh bagaimana menghitung dampak Pariwisata terhadap output, nilai tambah, upah/gaji dan tenaga kerja.

Misalkan kita akan menggunakan table I-O 67 sektor. Ini berarti kita akan menggunakan matrik pengganda (inverse matrix / matrik kebalikan) 67x67. Untuk mengetahui dampak pengeluaran wisatawan terhadap output, **matrik pengganda** tersebut akan **dikalikan** dengan **vektor kolom** yang mengandung nilai pengeluaran wisatawan yang telah dikonversi menjadi pengeluaran untuk tiap jenis produk.

Tabel 4.3.
Contoh matrik pengganda dan pengeluaran wisatawan (Rp M)

No Baris	Nomor Kolom Invers Matrik									Pengeluaran Wisatawan
	1	2	3	...	56	...	59	...	67	
1	1,074	0,000	0,001		0,001		0,002		0,000	0
2	0,000	1,026	0,000		0,000		0,000		0,000	0
3	0,001	0,000	1,043		0,000		0,000		0,000	0
...										...
56	0,000	0,000	0,000		1,002		0,000		0,000	11,70
...										...
59	0,000	0,001	0,001		0,005		1,063		0,003	13,92
...										...
67	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000		1,010	1,15

Contoh 1 :

Contoh pertama sangat sederhana yaitu hubungan antara **pengeluaran wisman** untuk penerbangan domestik dan output dari sektor yang menyediakan produk tersebut yaitu jasa angkutan udara. Untuk contoh yang lebih rumit akan diberikan pada bagian selanjutnya.

1. Hubungan antara konsumsi wisatawan dengan nilai output diformulasikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

$$X = (I - A^0)^{-1} \cdot W$$

Khusus untuk contoh ini :

X = matrik output sektor terkait jasa angkutan udara.

$(I-A^c)^{-1}$ = matrik pengganda

W_{59} = pengeluaran wisman untuk penerbangan domestik

Pada tabel I-O 67 sektor, jasa angkutan udara terdapat pada **baris** ke 59. Pengeluaran akhir untuk jasa angkutan udara yang berasal dari wisman akan menimbulkan dampak terhadap sektor-sektor ekonomi sebesar koefisien yang terdapat pada **kolom** 59 dikalikan dengan besarnya pengeluaran tersebut. Dalam invers matrik 67x67, pada kolom ke 59 tersebut terdapat 67 koefisien. Sebagai contoh

Tabel 4.4
Contoh koefisien Matrik Pengganda

No Baris	Sektor	Koefisien Kolom 59
1	Padi	0,0021
...		
5	Sayuran & buahan	0,0012
...		
19	Pemotongan hewan	0,0034
20	Unggas dan hasilnya	0,0044
...		
25	Penambangan minyak & gas	0,0351
...		
41	Pengilangan minyak bumi	0,0795
...		
49	Alat pengangkutan	0,0329
...		
59	Angkutan Udara	1,0630
...		
67	Yang tidak jelas batasnya	0,0003

Besar kecilnya koefisien tergantung pada kuat lemahnya keterkaitan antar jasa angkutan udara dengan sektor/ produk yang bersangkutan. Keterkaitan jasa angkutan udara dengan pertanian padi dan hortikultura (sayuran dan buah buahan) kecil. Dengan produk pemotongan hewan, unggas, penambangan minyak dan gas; dan alat pengangkutan lebih besar. Sudah tentu koefisien terbesar terdapat pada pengilangan minyak bumi dan jasa angkutan udara sendiri.

Misalkan pengeluaran wisman untuk penerbangan domestik selama setahun = Rp 13,92 milyar. Dengan menggunakan koefisien di atas, besarnya dampak langsung terhadap output jasa angkutan udara (dengan asumsi pengeluaran wisman terhadap sektor lain tidak ada atau nol) :

$1,0630 \times \text{Rp } 13,92 \text{ milyar} = \text{Rp } \mathbf{14,80} \text{ milyar.}$

Sedangkan kalau ingin diketahui dampak terhadap seluruh sektor terkait jasa angkutan udara (yang mempunyai keterkaitan ke belakang), dapat dihitung dengan mengalikan tiap koefisien pada kolom 59 dengan pengeluaran wisman untuk penerbangan domestik. Misal :

- Dampak terhadap sektor padi : $0,0021 \times 13,92 = 0,029$
- Dampak terhadap pengilangan minyak bumi : $0,0795 \times 13,92 = 1,11$
- Dampak terhadap industri alat pengangkutan : $0,0329 \times 13,92 = 0,46$

Total dampak terhadap seluruh sektor terkait adalah :

$(0,0021 + \dots + 0,0012 + \dots + 0,0034 + 0,0044 + \dots + 0,0351 + \dots + 0,0795 + \dots + 0,0329 + \dots + 1,0630 + \dots + 0,0003) \times 13,92$

Karena total koefisien untuk seluruh produk terkait jasa angkutan udara (matrik pengganda kolom 59) = 1.1573 maka dampak berganda konsumsi wisman, dalam hal ini pengeluaran untuk penerbangan domestik, pada output sektor terkait jasa angkutan udara: " $X_1 = 1, 7077 \times 13,92 = 23,77$ "

Dengan menggunakan komputer, kita tidak perlu menghitung satu per satu seperti ini. Matrik pengganda dikalikan dengan matrik pengeluaran wisatawan sekaligus sehingga diperoleh matrik baru yang berisi nilai output tiap sektor yang tercipta karena adanya pengeluaran wisatawan

2. Hubungan antara konsumsi wisatawan untuk penerbangan domestik dengan nilai tambah bruto jasa angkutan udara diformulasikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} V &= t (I-A^d)^{-1} \cdot W \\ &= v \cdot X \end{aligned}$$

Khusus untuk contoh ini :

$$V_{59} = v_{59} \cdot X_{59}$$

V_{59} = nilai tambah bruto jasa angkutan udara.

v_{59} = sel matriks diagonal koefisien nilai tambah bruto, yaitu rasio antara nilai tambah bruto jasa angkutan udara dengan outputnya.

X_{59} = output jasa angkutan udara

Tabel 4.5
Matrik diagonal koefisien NTB (v) :

No Baris	No Kolom								
	1	2	3	...	56	...	59	...	67
1	0,8653	0	0		0		0		0
2	0	0,8304	0		0		0		0
3	0	0	0,8125		0		0		0
...									
56	0	0	0		0,3392		0		0
...									
59	0	0	0		0		0,17511		0
...									
67	0	0	0		0		0		0,5011

Misalkan rasio antara nilai tambah bruto jasa angkutan udara dengan outputnya = 0,17511 maka kontribusi wisman pada nilai tambah bruto jasa angkutan udara: $V_{59} = 0,17511 \times \text{Rp } 14,80 \text{ milyar} = \text{Rp } 2,59 \text{ milyar}$

3. Hubungan antara konsumsi wisatawan dengan upah/ gaji jasa angkutan udara diformulasikan sebagai berikut :

$$G = g (I-A^d)^{-1} \cdot W$$

$$= g \cdot X$$

Khusus untuk contoh ini :

$$G_{59} = g_{59} \cdot X_{59}$$

G_{59} = Upah/gaji jasa angkutan udara

g_{59} = sel matriks diagonal koefisien upah/gaji, yaitu rasio antara upah/gaji jasa angkutan udara dengan outputnya.

X_{59} = output jasa angkutan udara

Tabel 4.6
Matrik diagonal koefisien Upah/ Gaji (g)

No Baris	No Kolom								
	1	2	3	...	56	...	59	...	67
1	0,1232	0	0		0		0		0
2	0	0,1160	0		0		0		0
3	0	0	0,1341		0		0		0
...									
56	0	0	0		0,1229		0		0
...									
59	0	0	0		0		0,05445		0
...									
67	0	0	0		0		0		0,1373

Misalkan rasio antara upah/ gaji jasa angkutan udara dengan outputnya = 0,05445 maka kontribusi wisman pada nilai tambah bruto jasa angkutan udara : $G_{59} = 0,05445 \times \text{Rp } 14,80 \text{ milyar} = \text{Rp } 0,81 \text{ milyar}$

4. Dalam menghitung dampak pariwisata terhadap tenaga kerja, digunakan koefisien tenaga kerja dengan rumus $I_i = L_i/X_i$, sehingga dalam $L_i = I_i X_i$. Khusus untuk contoh ini :

I_{59} = Koefisien tenaga kerja jasa angkutan udara

L_{59} = Jumlah tenaga kerja jasa angkutan udara

X_{59} = Output jasa angkutan udara

Tabel 4.7
Matrik diagonal koefisien Tenaga Kerja (I) :

No Baris	No Kolom								
	1	2	3	...	56	...	59	...	67
1	0,1199	0	0		0		0		0
2	0	0,3332	0		0		0		0
3	0	0	0,2761		0		0		0
...									
56	0	0	0		0,0746		0		0
...									
59	0	0	0		0		0,00257		0
...									
67	0	0	0		0		0		0,1985

Misalkan rasio antara jumlah tenaga kerja jasa angkutan udara dengan outputnya = 0,00257 maka dampak pengeluaran wisman pada kesempatan kerja jasa angkutan udara : $L = 0,00257 \times 14,80 = 0,038$ juta orang

Contoh 2 :

Hubungan antara **pengeluaran wisnus** untuk paket perjalanan wisata dan output dari sektor ekonomi yang mempunyai keterkaitan ke belakang dengan sektor jasa penunjang angkutan dan jasa lainnya.

1. Hubungan antara konsumsi wisatawan dengan nilai output diformulasikan sebagai berikut:

$$X = (I - A^q)^{-1} \cdot W$$

Khusus untuk contoh ini :

$X = 1) X_{60}$: output jasa penunjang angkutan

2) X_{66} : output jasa lainnya

$(I - A^q)^{-1}$ = matrik pengganda berfungsi sebagai koefisien regresi.

W_i = pengeluaran wisnus untuk paket perjalanan wisata yang dikonversi menjadi 1) W_{60} : jasa penunjang angkutan

2) W_{66} : jasa lainnya

Pada matrik pengganda 67x67, jasa penunjang angkutan terdapat pada baris ke 60 dan jasa lainnya terdapat pada baris ke 66 . Sebagai contoh, koefisiennya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Contoh Koefisien Matrik Pengganda

No Baris	Sektor	Koefisien	
		Jasa Penunjang Angkutan	Jasa Lainnya
1	Padi	0,0005	0,0024
...			
25	Penambangan minyak & gas	0,0193	0,0157
...			
41	Pengilangan minyak bumi	0,0289	0,0054
42	Barang karet & plastik	0,0137	0,0112
...			
49	Alat pengangkutan	0,0402	0,0045
...			
60	Penunjang angkutan	1,0221	0,0028
...			
66	Jasa lainnya	0,0065	1,0206
67	Yg tak jelas batasnya	0,0005	0,0005

Besar kecilnya koefisien tergantung pada kuat lemahnya keterkaitan antar jasa penunjang angkutan dan jasa lainnya, masing-masing dengan sektor/produk yang bersangkutan. Keterkaitan kedua jasa tersebut dengan pertanian padi sangat kecil. Keterkaitan jasa penunjang angkutan dengan industri alat pengangkutan lebih besar. Sudah tentu koefisien terbesar terdapat pada sektornya sendiri yaitu jasa penunjang angkutan dan jasa lainnya.

Misalkan pengeluaran wisnus untuk paket perjalanan wisata selama setahun = Rp 6,442 milyar yang terdiri dari jasa penunjang angkutan Rp 1,113 milyar dan jasa lainnya Rp 5,329 milyar. Dengan menggunakan koefisien di atas, besarnya dampak terhadap :

- 1) output jasa penunjang angkutan :
 $1,0221 \times \text{Rp } 1,113 \text{ milyar} = \text{Rp } \mathbf{1,137} \text{ milyar}$
- 2) output jasa lainnya :
 $1,0206 \times \text{Rp } 5,329 \text{ milyar} = \text{Rp } \mathbf{5,439} \text{ milyar}$

Sedangkan kalau ingin diketahui dampak terhadap seluruh sektor terkait, dapat dihitung dengan mengalikan tiap koefisien pada kolom 60 dan 66 dengan pengeluaran wisnus untuk paket perjalanan wisata yang telah dikonversi menjadi jasa penunjang angkutan dan jasa lainnya. Misal :

- Dampak pengeluaran wisnus untuk jasa penunjang angkutan terhadap sektor padi : $0,0005 \times 1,137 = 0,0006$
- Dampak pengeluaran wisnus untuk jasa penunjang angkutan terhadap pengilangan minyak bumi : $0,0289 \times 1,137 = 0,0329$
- Dampak pengeluaran wisnus untuk jasa penunjang angkutan terhadap industri alat pengangkutan : $0,0402 \times 1,137 = 0,0457$

Total dampak terhadap seluruh sektor terkait adalah :

- 1) Output sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang dengan jasa penunjang angkutan :

$$(0,0005 + \dots + 0,0193 + \dots + 0,0289 + 0,0137 + \dots + 0,0402 + \dots + 1,0221 + \dots + 0,0065 + 0,0005) \times 1,113$$

Total koefisien untuk seluruh produk terkait jasa penunjang angkutan (matrik pengganda kolom 60) = 1,5986 maka dampak berganda konsumsi wisnus, dalam hal ini pengeluaran untuk paket perjalanan wisata pada output sektor terkait jasa penunjang angkutan : " $X_i = 1,5986 \times 1,113 = 1,779$

- 2) Output sektor yang mempunyai keterkaitan ke belakang dengan jasa lainnya :

$$(0,0024 + \dots + 0,0157 + \dots + 0,0054 + 0,0112 + \dots + 0,0045 + \dots + 0,0028 + \dots + 1,0206 + 0,0005) \times 5,329$$

Total koefisien untuk seluruh produk terkait jasa lainnya (matrik pengganda kolom 66) = 1,4880 maka dampak berganda konsumsi wisnus, dalam hal ini pengeluaran untuk paket perjalanan wisata pada output sektor terkait jasa lainnya : " $X_i = 1,4880 \times 5,329 = 7,929$,

$$\text{Jumlah 1) dan 2) } = 1,779 + 7,929 = 9,708$$

2. Hubungan antara konsumsi wisatawan dengan nilai tambah bruto jasa penunjang angkutan dan jasa lainnya diformulasikan sebagai berikut :

$$V = v (I-A^d)^{-1} \cdot W$$

$$= v \cdot X$$

Khusus untuk contoh ini :

V_i = nilai tambah bruto

1) V_{60} : jasa penunjang angkutan

2) V_{66} : jasa lainnya.

v = sel matriks diagonal koefisien nilai tambah bruto (NTB), yaitu rasio antara nilai tambah bruto jasa penunjang angkutan dan jasa lainnya, masing masing terhadap outputnya.

Tabel 4.9
Matrik diagonal koefisien NTB (v) :

No Baris	Nomor Kolom								
	1	2	3	...	56	...	60	...	66
1	0,8753	0	0		0		0		0
2	0	0,8304	0		0		0		0
3	0	0	0,8125		0		0		0
...									
56	0	0	0		0,3492		0		0
...									
60	0	0	0		0		0,55521		0
...									
66	0	0	0		0		0		0,61639

- 1) Rasio antara nilai tambah bruto jasa penunjang angkutan dengan outputnya = 0,55521 maka dampak pengeluaran wisnus pada nilai tambah bruto jasa penunjang angkutan : $V_{60} = 0,55521 \times 1,137 = 0,631$
- 2) Rasio antara nilai tambah bruto jasa lainnya dengan outputnya = 0,61639 maka dampak pengeluaran wisnus pada nilai tambah bruto jasa lainnya :
 $V_{66} = 0,61639 \times 5,439 = 3,352$
3. Hubungan antara konsumsi wisatawan dengan upah/ gaji jasa penunjang angkutan dan jasa lainnya diformulasikan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} G &= g (I-A^d)^{-1} \cdot W \\ &= g \cdot X \end{aligned}$$

Khusus untuk contoh ini :

G_j = Upah/gaji 1) G_{60} : jasa penunjang angkutan

2) G_{66} : jasa lainnya

g_j = sel matriks diagonal koefisien upah/gaji, yaitu rasio antara upah/ gaji 1) jasa penunjang angkutan dan 2) jasa lainnya masing masing terhadap outputnya.

Tabel 4.10
Bentuk matrik koefisien Upah/ Gaji (g)

No Baris	No Kolom								
	1	2	3	...	56	...	60	...	66
1	0,1232	0	0		0		0		0
2	0	0,1061	0		0		0		0
3	0	0	0,1143		0		0		0
...									
56	0	0	0		0,1922		0		0
...									
60	0	0	0		0		0,18534		0
...									
66	0	0	0		0		0		0,25066

- 1) Rasio antara upah/ gaji jasa penunjang angkutan dengan outputnya = 0,18534 maka dampak pengeluaran wisnus pada upah/ gaji jasa penunjang angkutan : $W_{60} = 0,18534 \times 1,137 = 0,211$
 - 2) Rasio antara upah/ gaji jasa lainnya dengan outputnya = 0,25066 maka dampak pengeluaran wisnus pada upah/ gaji bruto jasa lainnya : $W_{66} = 0,25066 \times 5,439 = 1,363$
4. Dalam menghitung dampak pariwisata terhadap tenaga kerja, digunakan koefisien tenaga kerja dengan rumus $I_i = L/X_i$, sehingga dalam $L_i = I_i X_i$, Khusus untuk contoh ini :

I_i = Koefisien tenaga kerja 1) jasa penunjang angkutan
2) jasa lainnya

L_i = Jumlah tenaga kerja 1) L_{60} : jasa penunjang angkutan
2) L_{66} : jasa lainnya

X_i = Output 1) X_{60} : jasa penunjang angkutan
2) X_{66} : jasa lainnya

Tabel 4.11
Bentuk matrik koefisien Tenaga Kerja (I) :

No Baris	No Kolom								
	1	2	3	...	56	...	60	...	66
1	0,1991	0	0		0		0		0
2	0	0,3233	0		0		0		0
3	0	0	0,2167		0		0		0
...									
56	0	0	0		0,0647		0		0
...									
60	0	0	0		0		0,03578		0
...									
66	0	0	0		0		0		0,15071

- 1) Rasio antara jumlah tenaga kerja jasa penunjang angkutan dengan outputnya = 0,03578, maka dampak pengeluaran wisnus pada tenaga kerja jasa penunjang angkutan : $L_{60} = 0,03578 \times 1,137 = 0,04$ juta orang

- 2) Rasio antara jumlah tenaga kerja jasa lainnya dengan outputnya = 0,15071 maka dampak pengeluaran wisnus pada tenaga kerja jasa lainnya : $L_{66} = 0,15071 \times 5,439 = 0,820$ juta orang.

Contoh 3

Berikut ini akan diberikan contoh yang komprehensif, dengan melakukan penghitungan sekaligus dampak pengeluaran kepariwisataan untuk semua komponennya yaitu pengeluaran wisman, pengeluaran wisnus, pengeluaran wisatawan outbound, investasi pemerintah daerah, investasi swasta dan pengeluaran pemerintah daerah. Untuk memudahkan penghitungan akan digunakan tabel I-O klasifikasi 9 x 9. Dalam hal ini konversi pengeluaran kepariwisataan menjadi sangat tidak rinci.

Tabel 4.12
Matrik Pengganda : $(I - A^d)^{-1}$

Sektor	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1,0565	0,0387	0,2827	0,0125	0,0861	0,1274	0,0508	0,0176	0,0464
2	0,0005	1,0032	0,0120	0,0003	0,0803	0,0027	0,0025	0,0024	0,0017
3	0,0340	0,0967	1,1510	0,0200	0,2688	0,1211	0,1605	0,0348	0,1035
4	0,0006	0,0050	0,0079	1,0360	0,0026	0,0056	0,0093	0,0063	0,0072
5	0,0012	0,0140	0,0016	0,0007	1,0016	0,0044	0,0080	0,0134	0,0035
6	0,0118	0,0686	0,0816	0,0779	0,1223	1,1028	0,1407	0,0938	0,1095
7	0,0063	0,0591	0,0446	0,0361	0,0443	0,0783	1,0718	0,0454	0,0506
8	0,0048	0,1285	0,0205	0,0254	0,0466	0,0443	0,0632	1,0667	0,0203
9	0,0004	0,0098	0,0029	0,0043	0,0024	0,0066	0,0347	0,0288	1,0204

Tabel 4. 13
Pengeluaran kepariwisataan menurut Komponen
(Matrik W)

Sektor	I	II	III	IV	V	VI
1	8	18	-	-	-	-
2	4	9	-	-	-	-
3	56	132	6	1	33	-
4	13	33	2	-	-	-
5	-	-	-	1	26	-
6	1412	378	139	4	94	4
7	239	2846	22	28	711	17
8	142	287	13	-	-	21
9	102	207	9	-	-	23
Jumlah	1976	3910	191	34	864	65

Nama sektor :

1. Pertanian
2. Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Air Minum
5. Bangunan
6. Perdagangan, Hotel, Restoran
7. Angkutan, Komunikasi
8. Bank, Sewa, Jasa Perusahaan
9. Jasa jasa

Komponen Pengeluaran :

- I. Pengeluaran Wisman
- II. Pengeluaran Wisnus
- III. Pengeluaran Outbound,
- IV. Investasi Pemerintah Daerah,
- V. Investasi Swasta
- VI. Pengeluaran Pemerintah Daerah.

Tabel 4. 14
Dampak Pengeluaran Kepariwisatahan terhadap Output
menurut Komponen (Matrik X)

Sektor	I	II	III	IV	V	VI	Total
1	224	264	21	2	60	3	574
2	10	20	1	2	5	0	37
3	290	688	29	5	170	6	1189
4	26	67	3	0	7	0	104
5	11	29	1	0	32	1	74
6	1621	881	159	8	210	11	2891
7	382	3111	36	30	772	21	4352
8	233	512	22	2	51	24	844
9	123	321	11	1	25	25	506
Total	2919	5894	283	51	1332	91	10570

Angka tiap sel pada tabel IV.14 diperoleh melalui perkalian matrik $(I - A^d)^{-1}$ dengan matrik **W**.

Contoh :

- Sel $X_{1,I}$: dampak pengeluaran wisman pada output sektor 1 = perkalian baris 1 pada matrik $(I - A^d)^{-1}$ dengan kolom 1 matrik $W = 1,0565 \times 8 + 0,0387 \times 4 + 0,2827 \times 56 + 0,0125 \times 13 + 0,0861 \times 0 + 0,1274 \times 1412 + 0,0508 \times 239 + 0,0176 \times 142 + 0,0464 \times 102 = 224$
- Sel $X_{4,II}$: dampak pengeluaran wisnus pada output sektor 4 = perkalian baris 4 pada matrik $(I - A^d)^{-1}$ dengan kolom 2 matrik $W = 0,0006 \times 18 + 0,0050 \times 9 + 0,0079 \times 132 + 1,0360 \times 33 + 0,0026 \times 0 + 0,0056 \times 378 + 0,0093 \times 2846 + 0,0063 \times 287 + 0,0072 \times 207 = 67$
- Sel $X_{5,III}$: dampak pengeluaran outbound pada output sektor 5 = perkalian baris 5 pada matrik $(I - A^d)^{-1}$ dengan kolom 3 matrik $W = 0,0012 \times 0 + 0,0140 \times 0 + 0,0016 \times 6 + 0,0007 \times 2 + 1,0016 \times 0 + 0,0044 \times 139 + 0,0080 \times 22 + 0,0134 \times 13 + 0,0035 \times 9 = 1$
- Sel $X_{8,IV}$: dampak investasi pemda pada output sektor 8 = perkalian baris 8 pada matrik $(I - A^d)^{-1}$ dengan kolom 4 matrik $W = 0,0048 \times 0 + 0,1285 \times 0 + 0,0205 \times 1 + 0,0254 \times 0 + 0,0466 \times 1 + 0,0443 \times 4 + 0,0632 \times 28 + 1,0667 \times 0 + 0,0203 \times 0 = 2$
- Sel $X_{9,V}$: dampak investasi swasta pada output sektor 9 = perkalian baris 9 pada matrik $(I - A^d)^{-1}$ dengan kolom 5 matrik $W = 0,0004 \times 0 + 0,0098 \times 0 + 0,0029 \times 33 + 0,0043 \times 0 + 0,0024 \times 26 + 0,0066 \times 94 + 0,0347 \times 711 + 0,0288 \times 0 + 1,0204 \times 0 = 25$

- Sel $X_{9,v1}$: dampak pengeluaran pemda pada output sektor 9 = perkalian baris 9 pada matrik $(I - A^d)^{-1}$ dengan kolom 6 matrik $W = 0,0004 \times 0 + 0,0098 \times 0 + 0,0029 \times 0 + 0,0043 \times 0 + 0,0024 \times 0 + 0,0066 \times 4 + 0,0347 \times 17 + 0,0288 \times 21 + 1,0204 \times 23 = 25$

Tabel 4. 15
Matrik Koefisien NTB, Gaji/upah
dan Tenaga Kerja dan Pajak Tak Langsung per Sektor

Sektor	NTB	Gaji/ Upah	Tenaga Kerja	Pajak Tak Langsung
1	0,9820	0,2066	0,2167	0,0127
2	0,9213	0,0419	0,0255	0,0279
3	0,6357	0,0621	0,0364	0,0152
4	0,9657	0,0258	0,0169	0,0157
5	0,6383	0,1264	0,0693	0,0153
6	0,8430	0,2554	0,1013	0,0412
7	0,8267	0,0624	0,0394	0,0144
8	0,8764	0,0473	0,0248	0,0154
9	0,9403	0,1761	0,0899	0,0068

Tabel 4. 16
Dampak Pengeluaran Kepariwisata terhadap NTB
menurut Komponen (Matrik V)

Sektor	I	II	III	IV	V	VI	Total
1	220	260	21	2	59	3	565
2	9	18	1	2	4	0	34
3	184	437	18	3	108	4	754
4	25	65	3	0	7	0	100
5	7	19	1	0	21	0	48
6	1367	743	134	7	177	10	2438
7	315	2572	30	25	638	17	3597
8	204	448	19	2	45	21	739
9	115	302	11	1	24	23	476
Total	2446	4864	238	42	1083	78	8751

Angka tiap sel pada tabel IV.14 diperoleh melalui perkalian matrik **diagonal koefisien NTB** dengan matrik **X**.

Contoh :

Dampak tiap komponen pengeluaran kepariwisataan pada NTB sektor1 = perkalian **koefisien NTB sektor 1** dengan baris 1 matrik **X**, masing masing adalah :

$$\text{Komponen I} = 0,9820 \times 224 = 220$$

$$\text{Komponen II} = 0,9820 \times 264 = 260$$

$$\text{Komponen III} = 0,9820 \times 21 = 21$$

$$\text{Komponen IV} = 0,9820 \times 2 = 2$$

$$\text{Komponen V} = 0,9820 \times 60 = 59$$

$$\text{Komponen VI} = 0,9820 \times 3 = 3$$

$$\text{Total} = 0,9820 \times 574 = 565$$

- Dampak tiap komponen pengeluaran pada NTB sektor 4 = perkalian **koefisien NTB sektor 4** dengan baris 4 matrik **X**, masing masing adalah:

Komponen I = $0,9657 \times 26 = 25$

Komponen II = $0,9657 \times 67 = 65$

Komponen III = $0,9657 \times 3 = 3$

Komponen IV = $0,9657 \times 0 = 0$

Komponen V = $0,9657 \times 7 = 7$

Komponen VI = $0,9657 \times 0 = 0$

Total = $0,9657 \times 104 = 100$

Tabel 4. 17
Dampak Pengeluaran Kepariwisatahan terhadap Gaji/ Upah
menurut Komponen (Matrik G)

Sektor	I	II	III	IV	V	VI	Total
1	46	55	4	0	12	1	118
2	0	1	0	0	0	0	1
3	18	43	2	0	11	0	74
4	1	2	0	0	0	0	3
5	1	4	0	0	4	0	9
6	414	225	41	2	54	3	739
7	24	194	2	2	48	1	271
8	11	24	1	0	2	1	39
9	22	57	2	0	4	4	89
Total	537	605	52	4	135	10	1343

Angka tiap sel pada tabel IV.14 diperoleh melalui perkalian matrik **diagonal koefisien Gaji/Upah** dengan matrik **X**.

Contoh :

- Dampak tiap komponen pengeluaran kepariwisataan pada Gaji/ upah sektor 2 = perkalian **koefisien Gaji/Upah sektor 2** dengan baris 2 matrik **X**, masing masing adalah :

$$\text{Komponen I} = 0,0419 \times 10 = 0$$

$$\text{Komponen II} = 0,0419 \times 20 = 1$$

$$\text{Komponen III} = 0,0419 \times 1 = 0$$

$$\text{Komponen IV} = 0,0419 \times 2 = 0$$

$$\text{Komponen V} = 0,0419 \times 5 = 0$$

$$\text{Komponen VI} = 0,0419 \times 0 = 0$$

$$\text{Total} = 0,0419 \times 37 = 1$$

- Dampak tiap komponen pengeluaran kepariwisataan pada Gaji/ upah sektor 5 = perkalian **koefisien Gaji/ upah sektor 5** dengan baris 5 matrik **X**, masing masing adalah :

$$\text{Komponen I} = 0,1264 \times 11 = 1$$

$$\text{Komponen II} = 0,1264 \times 29 = 4$$

$$\text{Komponen III} = 0,1264 \times 1 = 0$$

$$\text{Komponen IV} = 0,1264 \times 0 = 0$$

$$\text{Komponen V} = 0,1264 \times 32 = 4$$

$$\text{Komponen VI} = 0,1264 \times 1 = 0$$

$$\text{Total} = 0,1264 \times 74 = 9$$

Tabel 4. 18
Dampak Pengeluaran Kepariwisataaan terhadap Tenaga Kerja
menurut Komponen (MATRIK L)

Sektor	I	II	III	IV	V	Vi	Total
1	49	57	5	0	13	1	125
2	0	1	0	0	0	0	1
3	11	25	1	0	6	0	43
4	0	1	0	0	0	0	1
5	1	2	0	0	2	0	5
6	164	89	16	1	21	1	292
7	15	123	1	1	30	1	171
8	6	13	1	0	1	1	22
9	11	29	1	0	2	2	45
Total	257	340	25	2	75	6	705

Angka tiap sel pada tabel IV.14 diperoleh melalui perkalian matrik **diagonal koefisien tenaga kerja** dengan matrik **X**.

Contoh :

- Dampak tiap komponen pengeluaran kepariwisataan pada tenaga kerja sektor 3 = perkalian **koefisien Tenaga Kerja sektor 3** dengan baris 3 matrik **X**, masing masing adalah :
 - Komponen I = $0,0364 \times 290 = 11$
 - Komponen II = $0,0364 \times 688 = 25$
 - Komponen III = $0,0364 \times 29 = 1$
 - Komponen IV = $0,0364 \times 5 = 0$
 - Komponen V = $0,0364 \times 170 = 6$

$$\text{Komponen VI} = 0,0364 \times 6 = 0$$

$$\text{Total} = 0,0364 \times 1189 = 43$$

- Dampak tiap komponen pengeluaran kepariwisataan pada tenaga kerja sektor 6 = perkalian **koefisien Tenaga Kerja sektor 6** dengan baris 6 matrik **X**, masing masing adalah :

$$\text{Komponen I} = 0,1013 \times 1621 = 164$$

$$\text{Komponen II} = 0,1013 \times 881 = 89$$

$$\text{Komponen III} = 0,1013 \times 159 = 16$$

$$\text{Komponen IV} = 0,1013 \times 8 = 1$$

$$\text{Komponen V} = 0,1013 \times 210 = 21$$

$$\text{Komponen VI} = 0,1013 \times 11 = 1$$

$$\text{Total} = 0,1013 \times 2891 = 292$$

Tabel 4. 19
Dampak Pengeluaran Kepariwisataan terhadap
Pajak Tak Langsung menurut Komponen (Matrik P)

Sektor	I	II	III	IV	V	VI	Total
1	3	3	0	0	1	0	7
2	0	1	0	0	0	0	1
3	4	10	0	0	3	0	17
4	0	1	0	0	0	0	1
5	0	0	0	0	0	0	0
6	67	36	7	0	9	0	119
7	5	45	1	0	11	0	62
8	4	8	0	0	1	0	13
9	1	2	0	0	0	0	3
Total	84	106	8	0	25	0	223

Angka tiap sel pada tabel IV.14 diperoleh melalui perkalian matrik **diagonal koefisien pajak tak langsung** dengan matrik **X**.

Contoh :

- Dampak tiap komponen pengeluaran kepariwisataan pada pajak tak langsung dari sektor 3 = perkalian **koefisien pajak tak langsung** dari **sektor 3** dengan baris 3 matrik **X**, masing masing adalah :

Komponen I	=	0,0152 x 290	=	4
Komponen II	=	0,0152 x 688	=	10
Komponen III	=	0,0152 x 29	=	0
Komponen IV	=	0,0152 x 5	=	0
Komponen V	=	0,0152 x 170	=	0
Komponen VI	=	0,0152 x 6	=	3
Total	=	0,0152 x 1189	=	17

- Dampak tiap komponen pengeluaran kepariwisataan pada pajak tak langsung dari sektor 6 = perkalian **koefisien pajak tak langsung** dari **sektor 6** dengan baris 6 matrik **X**, masing masing adalah :

Komponen I	=	0,0412 x 1621	=	67
Komponen II	=	0,0412 x 881	=	36
Komponen III	=	0,0412 x 159	=	7
Komponen IV	=	0,0412 x 8	=	0
Komponen V	=	0,0412 x 210	=	9
Komponen VI	=	0,0412 x 11	=	0
Total	=	0,0412 x 2891	=	119

BAB V

PENYAJIAN NERACA SATELIT PARIWISATA

Neraca satelit pariwisata sebagaimana yang direkomendasikan World Tourism Organization (WTO) disajikan dalam 10 (sepuluh) set tabel yang berkaitan dengan informasi mengenai penyediaan (*supply*) dan penggunaan (*use*) berbagai produk barang dan jasa bagi atau oleh kegiatan pariwisata.

Tabel atau sub neraca ini pada hakekatnya merupakan hasil proses kristalisasi dari konsep dan definisi, klasifikasi, transaksi, serta agregasi data yang berkaitan dengan industri pariwisata, sehingga data atau informasi yang disajikan dapat lebih terorganisasikan secara logika dan konsisten. Dengan demikian pengaruh kegiatan pariwisata dalam sistem ekonomi suatu negara dapat dibandingkan secara internasional.

Adapun 10 set tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Konsumsi wisatawan asing (*inbound tourist*) menurut jenis produk

Tabel 2 : Konsumsi wisatawan lokal (*domestic tourist*) menurut jenis produk

Tabel 3 : Konsumsi wisatawan di luar negeri (*outbound*) menurut jenis produk

Tabel 4 : Konsumsi wisatawan menurut jenis produk dan kategori wisatawan

Tabel 5 : Neraca Produksi Industri Pariwisata

Tabel 6 : Penyediaan jasa pariwisata untuk wisatawan menurut jenis produk

Tabel 7 : Jumlah dan Status Pekerja di Sektor Industri Pariwisata

Tabel 8 : Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) bagi kegiatan Pariwisata

Tabel 9 : Konsumsi kolektif wisatawan

Tabel 10 : Indikator-indikator Fisik Pariwisata

Untuk keperluan Nesparda, kesepuluh sub neraca itu dimodifikasi sesuai kebutuhan dan ketersediaan data. Informasi yang dimuat pada 12 set tabel baru ini adalah sebagai berikut:

1. Struktur pengeluaran wisatawan mancanegara (*international inbound tourist*) menurut negara asal wisman dan jenis produk (barang dan jasa) yang dikonsumsinya.
2. Struktur pengeluaran wisatawan nusantara yang datang ke propinsi bersangkutan (*domestic inbound tourist*) menurut jenis produk (barang dan jasa) yang dikonsumsinya dan Propinsi asal
3. Struktur pengeluaran wisatawan nusantara (*domestic tourist*) menurut jenis produk (barang dan jasa) yang dikonsumsinya
4. Struktur pengeluaran penduduk propinsi bersangkutan yang berkunjung ke luar negeri (*international outbound tourist*) menurut jenis produk (barang dan jasa) yang dikonsumsi dan negara tujuan

5. Struktur pengeluaran penduduk propinsi bersangkutan yang berkunjung ke luar propinsi (*domestic outbound tourist*) menurut jenis produk (barang dan jasa) yang dikonsumsi dan propinsi tujuan.
6. Struktur pengeluaran seluruh wisatawan menurut jenis produk barang dan jasa yang dikonsumsi dan jenis wisatawan (wisman, wisnus, outbound)
7. Struktur produksi sektor-sektor yang terkait pariwisata dengan dua bagian input yaitu input antara yang terdiri dari berbagai barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi dan input primer yang terdiri dari nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor terkait pariwisata.
8. Struktur pembentukan modal tetap bruto baik yang bersifat langsung oleh industri pariwisata maupun tidak langsung berupa infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah daerah. Modal tetap bruto ini terdiri dari bangunan hotel dan akomodasi lainnya, restoran, mesin dan peralatan, alat transportasi, bangunan untuk hiburan, rekreasi, seni dan budaya, infrastruktur pariwisata dan barang modal lainnya.
9. Struktur pekerja yang terlibat pada industri pariwisata dirinci menurut sektor yang terkait pariwisata dan jenis kelamin.
10. Struktur pengeluaran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam promosi dan pembinaan pariwisata dirinci menurut aktivitas yang dilakukan.
11. Peranan pariwisata dalam struktur PDRB dari sisi penggunaan
12. Dampak Kegiatan Pariwisata terhadap Output, NTB, Upah/Gaji, Pajak Tak Langsung (Milyar Rp) dan Tenaga Kerja (ribu orang) menurut Sektor Supply
13. Indikator fisik (bukan dalam satuan uang) kepariwisataan.

Penjelasan tentang muatan dan format dari tiap set tabel tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Struktur pengeluaran wisatawan mancanegara

Tabel ini menyajikan informasi/data tentang komponen utama barang dan jasa yang dikonsumsi wisatawan mancanegara dengan kriteria:

- Fokus pada deskripsi konsumsi wisatawan mancanegara
- Dinyatakan dalam satuan moneter
- Komposisi produk mengacu pada penggolongan barang dan jasa sesuai klasifikasi yang ditentukan daerah dengan tetap mengacu pada klasifikasi nasional.

Tabel 1.1 Distribusi Pengeluaran Wisman

Data tabel ini diperoleh dari survei pengeluaran wisman ketika wisman akan meninggalkan daerah yang bersangkutan. Bila tidak seluruh wisman disurvei, berarti angka yang disajikan merupakan hasil estimasi dari hasil sampel. Satuan dapat dalam rupiah atau dolar Amerika. Persentase distribusi adalah nilai tiap jenis pengeluaran dibagi dengan total pengeluaran dikali seratus persen.

Tabel 1.1
Distribusi Pengeluaran Wisman Tahun T

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun T	
		Nilai (US\$)	Distrib (%)
1.	Akomodasi		
2.	Makanan dan minuman		
3.	Souvenir		
4.	Belanja		
5.	Transpor lokal		
6.	Paket tour lokal		
7.	Penerbangan domestik		
8.	Pesiar		
9.	Hiburan		
10.	Kesehatan & kecantikan		
11.	Pemandu wisata		
12.	Pendidikan		
13.	Lainnya		
	Jumlah		100,00

Tabel 1.2 Pengeluaran Wisman Menurut Negara Asal

Data tabel ini juga diperoleh dari survei pengeluaran wisman ketika wisman akan meninggalkan daerah yang bersangkutan. Pada survei ini ditanyakan negara asal wisman, sehingga pengeluaran menurut negara asal dapat dihitung. Dengan demikian dapat diamati kecenderungan pengeluaran wisman dari suatu negara, misalnya pengeluaran wisatawan dari Eropa lebih besar dari pengeluaran wisatawan Singapura.

Tabel 1.2
Pengeluaran Wisman (Penerimaan Devisa dari Wisman)
Menurut Negara Asal,

No.	Negara Asal	Tahun T
1.	Singapura	
2.	Malaysia	
3.	Jepang	
4.	Australia	
5.	Taiwan	
6.	Korea Sel.	
7.	Amerika	
8.	Jerman	
9.	Inggris	
10.	Belanda	
11.	Lainnya	
	Jumlah	

Tabel 2 : Struktur pengeluaran wisatawan nusantara (*domestic inbound tourist*)

Tabel ini menyajikan informasi/data tentang komponen utama barang dan jasa yang dikonsumsi wisatawan nusantara dengan kriteria :

- Fokus pada deskripsi konsumsi wisatawan nusantara
- Dinyatakan dalam satuan moneter
- Komposisi produk mengacu pada penggolongan barang dan jasa sesuai klasifikasi yang ditentukan daerah dengan tetap mengacu pada klasifikasi nasional.

Tabel 2.1 Distribusi Pengeluaran Wisnus

Data untuk tabel ini diperoleh dari survei pengeluaran wisnus melalui pendekatan rumah tangga, pendekatan akomodasi atau pendekatan obyek wisata komersial selama berkunjung di propinsi ini. Bila tidak seluruh wisnus disurvei, berarti angka yang disajikan merupakan hasil estimasi dari hasil sampel. Persentase distribusi yang disajikan adalah nilai tiap jenis pengeluaran dibagi dengan total pengeluaran dikali seratus persen.

Tabel 2.2 Pengeluaran Wisnus Menurut Propinsi Asal

Data pada tabel ini juga diperoleh dari survei pengeluaran wisnus dengan berbagai pendekatan. Pada survei ini ditanyakan propinsi asal wisnus, sehingga pengeluaran menurut propinsi asal dapat dihitung. Dengan demikian dapat diamati kecenderungan pengeluaran wisnus dari suatu propinsi, misalnya pengeluaran wisatawan dari DKI Jakarta lebih besar dari pengeluaran wisatawan Bengkulu.

Tabel 2.1
Distribusi Pengeluaran Wisnus Tahun T

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun T	
		Nilai (Rp)	Distrib (%)
1.	Akomodasi		
2.	Makanan dan minuman		
3.	Souvenir		
4.	Belanja		
5.	Transpor lokal		
6.	Paket tour lokal		
7.	Penerbangan domestik		
8.	Pesiar		
9.	Hiburan		
10.	Kesehatan & kecantikan		
11.	Pemandu wisata		
12.	Pendidikan		
13.	Lainnya		
	Jumlah		100,00

Tabel 2.2
Pengeluaran Wisnus di Propinsi ini Menurut
Propinsi Asal , Tahun T

No.	Propinsi Asal	Tahun T
1.		
2.		
3.		
4.		
	Jumlah	

Tabel 3 : Struktur pengeluaran wisatawan nusantara (*domestic tourist*)

Tabel ini menyajikan informasi/data tentang komponen utama barang dan jasa yang dikonsumsi wisatawan nusantara dengan kriteria :

- Fokus pada deskripsi konsumsi wisatawan nusantara
- Dinyatakan dalam satuan moneter
- Komposisi produk mengacu pada penggolongan barang dan jasa sesuai klasifikasi yang ditentukan daerah dengan tetap mengacu pada klasifikasi nasional.

Tabel 3.1 Distribusi Pengeluaran Wisnus

Data untuk tabel ini diperoleh dari survei pengeluaran wisnus melalui pendekatan rumahtangga, pendekatan akomodasi atau pendekatan obyek wisata komersial selama berkunjung di propinsi ini. Bila tidak seluruh wisnus disurvei, berarti angka yang disajikan merupakan hasil estimasi dari hasil sampel. Persentase distribusi yang disajikan adalah nilai tiap jenis pengeluaran dibagi dengan total pengeluaran dikali seratus persen.

Tabel 3.2. Pengeluaran Wisnus Menurut Kabupaten/Kota Asal dalam Propinsi ini.

Data tabel ini juga diperoleh dari survei wisnus yang juga meneliti tentang pola perjalanan wisnus dalam propinsi yang bersangkutan. Pada survei ini ditanyakan kabupaten/ kota asal wisnus, sehingga pengeluaran menurut kabupaten/ kota asal dapat dihitung. Dengan demikian dapat diamati kecenderungan pengeluaran wisnus dari suatu propinsi, misalnya di Propinsi Jawa Barat, pengeluaran wisatawan asal Cirebon lebih besar dari pengeluaran wisatawan asal Garut .

Tabel 3.1
Distribusi Pengeluaran Wisnus Tahun T

No.	Jenis Pengeluaran	Tahun T	
		Nilai (Rp)	Distrib (%)
1.	Akomodasi		
2.	Makanan dan minuman		
3.	Souvenir		
4.	Belanja		
5.	Transpor lokal		
6.	Paket tour lokal		
7.	Penerbangan domestik		
8.	Pesiar		
9.	Hiburan		
10.	Kesehatan & kecantikan		
11.	Pemandu wisata		
12.	Pendidikan		
13.	Lainnya		
	Jumlah		100,00

Tabel 3.2
Pengeluaran Wisnus di Propinsi ini Menurut
Kabupaten / Kota Asal dalam Propinsi ini, Tahun T

No.	Kab/ Kota Asal	2001
1.		
2.		
3.		
4.		
.		
.		
.		
n.		
	Jumlah	

Tabel 4 : Struktur pengeluaran wisatawan ke luar negeri (*international outbound tourist*)

Tabel ini menyajikan informasi/data tentang komponen utama barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk propinsi yang bersangkutan selama melakukan perjalanan ke luar negeri dengan kriteria :

- ❖ Fokus pada deskripsi konsumsi wisatawan outbound internasional
- ❖ Dinyatakan dalam satu satuan moneter
- ❖ Komposisi produk mengacu pada penggolongan barang dan jasa sesuai klasifikasi yang ditentukan daerah dengan tetap mengacu pada klasifikasi nasional.

Yang dimaksud wisatawan outbound internasional adalah :

Wisatawan dari propinsi yang bersangkutan berkunjung ke luar negeri

Tabel 4.1 Pengeluaran Wisatawan Outbound (dari Propinsi ini ke luar negeri) Menurut Jenis dan Kategori Pengeluaran, Tahun T

Data untuk tabel ini diperoleh dari survei wisatawan dari propinsi ini yang bepergian ke luar negeri, melalui pendekatan rumah tangga atau ketika mereka tiba kembali dari luar negeri (di bandara dan pelabuhan propinsi ini). Bila tidak seluruh wisatawan disurvei, berarti angka yang disajikan merupakan hasil estimasi dari hasil sampel. Persentase distribusi yang disajikan adalah nilai tiap jenis pengeluaran dibagi dengan total pengeluaran dikali seratus persen.

Tabel 4.2 Pengeluaran Wisatawan Outbound (dari Propinsi ini ke luar negeri) Menurut Negara Tujuan, Tahun T

Data untuk tabel ini diperoleh dari survei wisatawan dari propinsi ini yang bepergian ke luar negeri, melalui pendekatan rumah tangga atau ketika mereka tiba kembali dari luar negeri (di bandara dan pelabuhan propinsi ini). Bila tidak seluruh wisatawan disurvei, berarti angka yang disajikan merupakan hasil estimasi dari hasil sampel. Persentase distribusi yang disajikan adalah nilai tiap jenis pengeluaran dibagi dengan total pengeluaran dikali seratus persen.

Tabel 4.1
Pengeluaran Wisatawan Outbound (ke Luar Negeri)
Menurut Jenis dan Kategori Pengeluaran , Tahun T

No.	Jenis Pengeluaran	Kategori Pengeluaran			
		Sebelum Pergi	Selama Pergi	Sesudah Pergi	Jumlah
1.	Akomodasi				
2.	Makanan dan minuman				
3.	Souvenir				
4.	Belanja				
5.	Transpor lokal				
6.	Paket tour lokal				
7.	Penerbangan domestik				
8.	Pesiar				
9.	Hiburan				
10.	Kesehatan & kecantikan				
11.	Pemandu wisata				
12.	Pendidikan				
13.	Lainnya				
	Jumlah		100,00		100,00

Tabel 4.2. Pengeluaran Wisatawan Outbound (International Outbound Tourist) Menurut Negara Tujuan, Tahun T

No.	Negara Tujuan	Tahun t
1.	Singapura	
2.	Malaysia	
3.	Jepang	
4.	Australia	
.		
.		
.		
.		
	Jumlah	

Tabel 5: Struktur pengeluaran wisatawan ke luar propinsi (*domestic outbound tourist*)

Tabel ini menyajikan informasi/data tentang komponen utama barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk propinsi yang bersangkutan selama melakukan perjalanan ke luar propinsi dengan kriteria:

- ❖ Fokus pada deskripsi konsumsi wisatawan outbound domestik
- ❖ Dinyatakan dalam satu satuan moneter
- ❖ Komposisi produk mengacu pada penggolongan barang dan jasa sesuai klasifikasi yang ditentukan daerah dengan tetap mengacu pada klasifikasi nasional.

Yang dimaksud wisatawan outbound domestik adalah:

Wisatawan dari propinsi yang bersangkutan yang melakukan perjalanan ke propinsi lain di Indonesia

Tabel 5.1. Pengeluaran Wisatawan Outbound (*domestic outbound tourist*) Menurut Jenis dan Kategori Pengeluaran, Tahun T

Data tabel ini diperoleh dari survei wisatawan dari propinsi yang bersangkutan yang bepergian ke propinsi lain melalui pendekatan ruma htangga atau ketika mereka tiba kembali di bandara, terminal bus dan pelabuhan di propinsi ini. Bila tidak seluruh wisatawan disurvei, berarti angka yang disajikan merupakan hasil estimasi dari hasil sampel. Persentase distribusi yang disajikan adalah nilai tiap jenis pengeluaran dibagi dengan total pengeluaran dikali seratus persen.

**Tabel 5.1.
Pengeluaran Wisatawan Propinsi ini yang pergi ke Propinsi lain
Menurut Jenis dan Kategori Pengeluaran , Tahun T**

No.	Jenis Pengeluaran	Kategori Pengeluaran			Jumlah
		Sebelum Pergi	Selama Pergi	Sesudah Pergi	
1.	Akomodasi				
2.	Makanan dan minuman				
3.	Souvenir				
4.	Belanja				
5.	Transpor lokal				
6.	Paket tour lokal				
7.	Pesiar				
8.	Hiburan				
9.	Kesehatan & kecantikan				
10.	Lainnya				
	Jumlah		100,00		100,00

Tabel 5.2. Pengeluaran Wisatawan Outbound (*domestic outbound tourist*) Menurut Propinsi Tujuan, Tahun T

Data tabel ini diperoleh dari survei wisatawan dari propinsi yang bersangkutan yang bepergian ke propinsi lain melalui pendekatan rumah tangga atau ketika mereka tiba kembali di bandara, terminal bus dan pelabuhan di propinsi ini. Bila tidak seluruh wisatawan disurvei, berarti angka yang disajikan merupakan hasil estimasi dari hasil sampel. Persentase distribusi yang disajikan adalah nilai tiap jenis pengeluaran dibagi dengan total pengeluaran dikali seratus persen.

Tabel 5.2. Pengeluaran Wisatawan Outbound (Domestic Outbound Tourist) Menurut Propinsi Tujuan, Tahun T

No.	Propinsi Tujuan	Tahun t
1.	NAD	
2.	Sumatera Utara	
3.	Sumater Barat	
4.		
30.		
	Jumlah	

Tabel 6 : Struktur Pengeluaran Seluruh Wisatawan

Merupakan gabungan dari tabel 1 sampai dengan tabel 5 mengenai pengeluaran wisatawan menurut jenis barang dan jasa yang dikonsumsi wisatawan dan jenis wisatawan.

Tabel 6.1. Pengeluaran Wisatawan Menurut Barang dan Jasa yang Dikonsumsi dan Jenis Wisatawan, Tahun T.

Pada tabel ini disajikan pengeluaran wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara dari propinsi lain dan antar kabupaten/ kota, wisatawan outbound ke luar negeri dan ke propinsi lain, yang merupakan rekapitulasi dari tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4 dan tabel 5, menurut jenis barang dan jasa yang dikonsumsi. Data nilai pengeluaran disajikan dalam jutaan rupiah.

Tabel 6.2 Pengeluaran Wisatawan per perjalanan dan per hari Menurut Jenis Wisatawan, Tahun T

Pada tabel ini disajikan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara dari propinsi lain dan antar kabupaten/ kota, wisatawan outbound ke luar negeri dan ke propinsi lain per kunjungan/ per perjalanan/ per trip dan pengeluaran per hari berdasarkan jumlah pengeluaran yang terdapat pada tabel 6.1. Untuk mendapatkan rata-rata pengeluaran per perjalanan diperlukan data jumlah kunjungan/perjalanan, sedangkan untuk mendapatkan rata-rata pengeluaran per hari diperlukan data rata-rata lama tinggal wisatawan. Data jumlah perjalanan dan lama tinggal tiap jenis wisatawan harus diperoleh masing-masing dari survei wisatawan yang bersangkutan. Satuan yang digunakan pada tiap baris berbeda. Penyajian data jumlah nilai pengeluaran dalam jutaan rupiah, jumlah kunjungan wisman dan wisnus dari propinsi lain dalam satuan kunjungan, jumlah perjalanan outbound/ keluar propinsi dalam satuan perjalanan, rata-rata pengeluaran per perjalanan dalam ratusan ribu rupiah dan rata-rata pengeluaran per hari disajikan dalam ribuan rupiah.

Tabel 6.1
Pengeluaran Wisatawan Menurut Jenis Barang dan Jasa
dan Jenis Wisatawan, Tahun T. (juta Rp)

Barang & Jasa	Wisman	Wisnus Daerah	Wis Out domestik			Jumlah
			Sebelum Pergi	Selama Pergi	Sesudah Pergi	
Akomodasi						
Makanan dan minuman						
Souvenir						
Belanja						
Transpor lokal						
Paket tour lokal						
Penerbangan domestik						
Pesiar						
Hiburan						
Kesehatan & kecantikan						
Pemandu wisata						
Pendidikan						
Lainnya						
Jumlah						

Tabel 6.2
Pengeluaran Wisatawan per perjalanan dan per hari
Menurut Jenis Wisatawan, Tahun T

Rincian	Wisman	Wisnus Daerah	Wis Out domestik			Jumlah
			Sebelum Pergi	Selama Pergi	Sesudah Pergi	
a. Jumlah Pengeluaran						
b. Jumlah Perjalanan						
c. pengeluaran / jalan (a : b)						
d. Lama tinggal (hari)						
e. Pengeluaran / hari (c : d)						

Tabel 7 : Struktur produksi sektor sektor yang terkait pariwisata

Tabel ini menyajikan struktur neraca produksi dari sektor pariwisata:

- Struktur neraca terdiri dari input/ biaya antara, input primer (nilai tambah bruto) dan struktur output (I - O)
- Input antara yang disajikan adalah produk dan jasa yang digunakan oleh perusahaan/usaha yang secara spesifik bergerak di bidang pariwisata dan yang terkait pariwisata.
- Dalam penentuan struktur harus memperhatikan relevansi konsep hubungan antara “produsen - produksi – produk - produktivitas” pada data yang disajikan.
- Diolah dari data dasar penyusunan Produk Domestik (Regional) Bruto

Tabel 7.1 Struktur Input Antara Sektor Pariwisata.

Input antara dari suatu sektor dapat berasal dari banyak sektor. Begitu juga dengan sektor sektor yang dikategorikan sebagai sektor pariwisata. Jasa perhotelan menggunakan input bahan makanan dari pertanian, input berupa listrik, air, jasa komunikasi, jasa keuangan dan input lain dari berbagai sektor. Pada tabel ini terlihat struktur atau komposisi input antara masing masing sektor dan perbandingannya dengan sektor lain secara komprehensif.

Tabel 8 : Struktur pembentukan modal tetap bruto

Tabel ini menyajikan informasi mengenai pengadaan aset (modal) spesifik yang langsung maupun tidak langsung mendukung kegiatan pariwisata, yang diadakan baik oleh industri pariwisata maupun lainnya. Dalam pengumpulan datanya perlu ekstra hati-hati untuk memastikan apakah barang modal yang diadakan ada kaitannya dengan pariwisata atau tidak. Barang modal tersebut meliputi :

- Bangunan Hotel dan Akomodasi lain (wisma, home stay)
- Bangunan Restoran dan sejenisnya
- Bangunan Pusat Perbelanjaan
- Bangunan/ gedung untuk olah raga/rekreasi/hiburan/kesenian/ kebudayaan
- Infrastruktur (jalan, jembatan, saluran air bersih, listrik, telepon) di daerah tujuan wisata dan obyek dan daya tarik wisata.
- Bangunan Lainnya
- Mesin dan Peralatan
- Alat Angkutan
- Barang Modal Lainnya

Tabel 7.1
Struktur Input Antara Sektor Pariwisata
Tahun T (%)

Input	Sektor Pariwisata								
	Hotel	Resto	Angk KA	Angk Jln R	Angk Air	Angk Udara	Bgn & Js Pers	Hib /rek/ bud	Tunj. Angk.
I. Input Antara									
1. Pertanian									
2. Pertambangan									
3. Industri									
4. Listrik, Gas, Air									
5. Bangunan									
6. Perdagangan									
7. Restoran									
8. Hotel									
9. Kereta Api									
10. Angk. darat									
11. Angk. air									
12. Angk Udara									
13. Js Penuj. Angk									
14. Komunikasi									
15. Lemb. Keuang.									
16. Sewa & Js Psh									
17. Pem Um , Perth									
18. Js Sos & Masy									
19. Jasa Lainnya									
20. Keg. tak jelas									

Tabel 8.1 Nilai Investasi Fisik di Sektor Pariwisata Menurut Jenis Barang Modal dan Penanam Modal

Secara sederhana tabel ini menyajikan nilai investasi fisik yang dilakukan pemerintah dan dunia usaha untuk membangun kepariwisataan di daerah ini. Investasi dunia usaha (swasta, BUMN, BUMD) tidak dibatasi pada investasi perusahaan yang secara spesifik bergerak di bidang pariwisata, tetapi juga yang berusaha di sektor yang terkait pariwisata. Data investasi ini dirinci menurut jenis barang modal dan investor/penanam modal. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua investasi yang dilakukan pada sektor terkait pariwisata adalah untuk pariwisata karena produk sektor tersebut diminta juga oleh konsumen di luar lingkup pariwisata. Data investasi pada tabel ini baru memberikan indikasi awal tentang investasi bidang pariwisata. Bila data tersedia, penyajian dapat dirinci lebih lanjut.

Tabel 8.2 Peranan Pariwisata pada Pembentukan Modal Tetap Bruto Dalam Produk Domestik Regional Bruto

Tabel ini menyajikan kontribusi pariwisata terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam Produk Domestik Regional Bruto yang digambarkan dalam persentase nilai investasi/pembentukan modal tetap pada sektor pariwisata daerah terhadap total nilai pembentukan modal tetap dalam perekonomian daerah. Tabel ini juga sekaligus memperlihatkan komposisi kontribusi pariwisata menurut jenis barang modal. Untuk mendapatkan komposisi dan sekaligus kontribusi pariwisata terhadap PMTB yang akurat, data nilai investasi yang benar-benar untuk pariwisata saja harus diketahui. Untuk sektor yang terkait pariwisata tetapi bukan spesifik pariwisata, data

seperti itu cukup sulit diperoleh. Diperlukan survei khusus untuk mendapatkannya.

Tabel 8.1
Nilai Investasi Fisik di Sektor Pariwisata Menurut
Jenis Barang Modal dan Penanam Modal (milyar Rp)

Jenis Barang Modal	Penanam Modal			
	Swasta/ BUMN/ BUMD	Pemerintah		Jumlah
		Pusat	Daerah	
1. Bgn Hotel & Akom lain				
2. Bgn Resto & sejenisnya				
3. Bgn Pusat Perbelanjaan				
4. Bgn OR/rek/hib/seni/bud				
5. Infrastruktur				
6. Bangunan Lainnya				
7. Mesin dan Peralatan				
8. Alat Angkutan				
9. Perbaikan besar tanah.				
10. Barang Modal Lainnya				
Jumlah				

Tabel 8.2
Peranan Pariwisata pada Pembentukan
Modal Tetap Bruto (PMTB) Dalam PDB,
Tahun T (%)

Jenis Barang Modal	% Pariwisata pd PMTB
1. Bangunan	
2. Infrastruktur	
3. Bangunan Lainnya	
4. Mesin dan Peralatan	
5. Alat Angkutan	
6. Barang Modal Lainnya	
Jumlah	

Tabel 9: Struktur pekerja pada industri pariwisata

Menyajikan data/informasi tentang tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan industri pariwisata. Hal hal yang masih perlu diperhatikan:

- Data statistik tenaga kerja yang lengkap untuk semua industri terkait pariwisata relatif sulit diperoleh karena terbatasnya sistem informasi statistik yang ada.
- Penetapan karakteristik pekerja disesuaikan dengan data yang tersedia serta kebutuhan analisis
- Penggolongan tenaga kerja menurut induk semang (*employer*) dan pekerja (*employee*) perlu diupayakan.

Tabel 9.1 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Terkait Pariwisata Menurut Jenis Kelamin, Tahun T

Secara sederhana tabel ini menyajikan komposisi tenaga kerja di sektor yang secara spesifik bergerak di bidang pariwisata maupun di sektor yang terkait pariwisata; dirinci menurut jenis kelamin. Data tenaga kerja diperoleh dari survei / sensus terhadap perusahaan/ usaha pada industri atau sektor yang bersangkutan yang mencakup keterangan mengenai tenaga kerja. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua tenaga kerja pada sektor terkait pariwisata adalah tenaga kerja pariwisata karena barang dan jasa yang dihasilkan tidak seluruhnya dikonsumsi wisatawan. Data tenaga kerja pada tabel ini baru memberikan indikasi awal tentang ketenagakerjaan bidang pariwisata. Bila data tersedia, data tenaga kerja ini dapat dirinci menurut berbagai karakteristik demografi seperti umur dan pendidikan.

Tabel 10: Struktur pengeluaran pemerintah Daerah dan dunia usaha

Tabel 10 menyajikan pengeluaran konsumsi untuk pariwisata yang manfaatnya dapat dirasakan secara bersama-sama (bukan individual). Pengeluaran ini umumnya merupakan pengeluaran atas layanan yang diberikan pemerintah daerah (Propinsi/Kabupaten) untuk meningkatkan dan mendorong industri pariwisata seperti Promosi, Perencanaan Umum Serta Koordinasi Pembangunan Kepariwisataaan, Pembangunan Sistem Informasi Kepariwisataaan, Penelitian & Pengembangan, Pelayanan Informasi, Pengamanan & Perlindungan Daerah Tujuan Wisata dan Obyek Daya tarik Wisata, Pengawasan & Regulasi.

Tabel 9.1
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Terkait Pariwisata
Menurut Jenis Kelamin, Tahun T

Sektor	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Hotel dan Akomodasi lain			100,00
2. Restoran dan sejenis			100,00
3. Angkutan Kereta Api			100,00
4. Angkutan Jalan Raya			100,00
5. Angkutan Air			100,00
6. Angkutan Udara			100,00
7. Jasa Penunjang Angkutan			100,00
8. Usaha Bgn & Jasa Perush			100,00
9. Jasa Lainnya			100,00
10. Industri non-makanan			100,00
11. Jasa Sosial & Kemasy.			100,00
12. Perdagangan			100,00
Jumlah			100,00

Tabel 10
Pengeluaran Pemerintah untuk Promosi & Pembinaan
Pariwisata Menurut Jenis Aktivitas, Tahun T
(milyar)

Jenis Aktivitas	Pemerintah		
	Propinsi	Kab/Kota	Jumlah
1. Promosi			
2. Perencanaan & Koor Pemb			
3. Sistem Informasi			
4. Penelitian & Pengembangan			
5. Pelayanan Info			
6. Pengamanan & Perlindungan			
7. Pengawasan & Regulasi			
8. Lainnya			
Jumlah			

Tabel 11: Peranan pariwisata dalam struktur PDRB dari sisi penggunaan

Tabel ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar PDRB tiap sektor terkait pariwisata yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ekspor dan impor. Untuk itu dampak pariwisata terhadap NTB per sektor dirinci menurut penggunaannya. Jumlah masing masing kolom tidak sama dengan 100 persen. Pada tabel ini terlihat apakah konsumsi rumahtangga dari hotel dan restoran lebih besar dari pada konsumsi rumahtangga dari angkutan darat, atau sebaliknya. Demikian pula dengan sektor yang lain dan penggunaan PDRB yang lain.

Tabel 11
Peranan Pariwisata pada Penggunaan PDRB, Tahun T (%)

Sektor Terkait Pariwisata	Penggunaan PDRB			
	Kons RT	Kons Pem	Ekspor	Impor
Pertanian				
Pertambangan + Penggalian				
Industri				
Listrik, gas dan air minum				
Bangunan				
Perdagangan				
Restoran dan hotel				
Angkutan kereta api				
Angkutan darat				
Angkutan air				
Angkutan udara				
Jasa penunjang angkutan				
Komunikasi				
Jasa Lainnya				
Jumlah				

Tabel 12. Dampak Pariwisata terhadap Output, Nilai Tambah Bruto, Upah/Gaji, Pajak Tak Langsung dan Tenaga Kerja menurut Sektor Supply

Peran pariwisata dalam perekonomian tidak cukup digambarkan oleh satu tabel saja. Satu set tabel 12 diharapkan mampu memberikan gambaran yang lengkap mengenai komposisi output, komposisi input, nilai tambah bruto dan balas jasa terhadap faktor produksi. Tabel 12 menyajikan informasi kuantitatif yang menunjukkan:

- Pertemuan/transaksi antara sisi penyediaan dengan sisi konsumsi
- Pengukuran terhadap besaran nilai output, nilai tambah bruto, upah/gaji, pajak tidak langsung, dan tenaga kerja yang disumbangkan industri pariwisata pada tiap sektor terkait.

Nilai Tambah Bruto (NTB) pada tabel 11.1 sampai 11.3 adalah selisih antara nilai output dan nilai konsumsi antara. Ada dua macam NTB yaitu :

- 1) NTB dari industri yang menghasilkan produk berkarakteristik pariwisata (*the value added of the tourism industries / VATI*) yang diperoleh dengan menjumlahkan semua NTB dari semua produsen produk berkarakteristik pariwisata.
- 2) NTB dari industri yang menghasilkan produk terkait pariwisata (*the tourism value added/TVA*) yang diperoleh dengan menjumlahkan porsi tertentu dari NTB yang berasal dari output yang dikonsumsi wisatawan untuk semua produsen produk spesifik pariwisata. TVA kurang mencerminkan NTB yang sebenarnya dan tergantung pada asumsi yang dibuat.

TVA disajikan pada tabel 11, sedangkan VATI merupakan bagian dari NTB setelah diidentifikasi industri mana yang menghasilkan produk berkarakteristik pariwisata. Tabel VATI perlu dieksplorasi lebih jauh bila tabel I-O pariwisata telah dapat dibuat.

Interpretasi yang dapat digali dari tabel 11 adalah bahwa keseimbangan antara sisi “supply” dan “demand” bagi industri pariwisata terbentuk melalui mekanisme pasar. Permintaan akan jasa pariwisata tentu akan menumbuhkan kegiatan ekonomi sebagai pemasoknya (*demand pull*

supply). Dengan demikian maka besarnya “supply” akan sama dengan “demand” (*equilibrium*). Tetapi kondisi ini tidak berlaku bagi usaha pariwisata yang juga melakukan layanan terhadap non-kepariwisataan. Oleh karena itu dalam tabel 11 akan digambarkan proporsi output ekonomi domestik yang dikonsumsi oleh kegiatan pariwisata, secara langsung maupun tidak langsung, baik yang diselenggarakan oleh industri pariwisata maupun industri non-pariwisata.

Barang dan jasa yang dihasilkan oleh industri pariwisata maupun non-pariwisata di suatu daerah, jika kemudian dikonsumsi oleh wisatawan mancanegara (wisman) maka akan diperlakukan sebagai “ekspor” Indonesia. Di sisi lain apabila industri-industri tersebut juga menggunakan input yang berasal dari luar negeri maka akan diperlakukan sebagai “impor”.

Tabel 12.1. Dampak Kegiatan Pariwisata terhadap Output, NTB, Upah/Gaji, Pajak Tak Langsung (Milyar Rp) dan Tenaga Kerja (ribu orang) menurut Sektor Supply

Nesparda menghendaki adanya indikator yang dapat menggambarkan peranan pariwisata dalam perekonomian. Dampak pariwisata terhadap Output, Nilai Tambah Bruto (NTB), Upah/Gaji, Pajak Tak Langsung (PTL) dan Tenaga Kerja yang diperoleh dengan model I-O, seperti yang diuraikan pada bab IV, perlu disajikan secara komprehensif. Tabel 11.1 dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tersebut. Pada tabel ini dampak tersebut dirinci menurut sektor sehingga dapat diketahui perbandingannya.

Dampak terhadap total output merupakan penjumlahan dari dampak pengeluaran wisman, wisnus, wisatawan outbound regional, investasi dan promosi (sektor demand) terhadap output. Demikian pula dengan NTB, Upah/

Gaji, Pajak Tak Langsung dan Tenaga Kerja, merupakan penjumlahan dari dampak yang ditimbulkan oleh sektor demandnya.

Tabel 12.2. Distribusi Persentase Dampak Pariwisata terhadap Output, NTB, Upah/Gaji, Pajak Tak Langsung dan Tenaga Kerja menurut Sektor Supply

Struktur dampak pariwisata terhadap perekonomian dapat dilihat dari distribusi persentase dampak pariwisata terhadap Output, Nilai Tambah Bruto (NTB), Upah/Gaji, Pajak Tak Langsung (PTL) dan Tenaga Kerja menurut sektor. Pada tabel ini terlihat sektor mana yang paling besar menerima dampak dari pariwisata dan sektor mana yang paling kecil menerima dampak dari pariwisata

Tabel 12.3 Dampak Pariwisata terhadap Output, NTB, Upah/Gaji, dan PTL menurut Sektor Demand

Dampak pariwisata terhadap Output, Nilai Tambah Bruto (NTB), Upah/Gaji, Pajak Tak Langsung (PTL) dan Tenaga Kerja terjadi karena adanya permintaan terhadap jasa pariwisata yang diwujudkan dalam pengeluaran wisatawan, investasi, dan promosi. Penghitungan dampak pariwisata dengan model I-O, seperti yang diuraikan pada bab IV dilakukan berdasarkan sektor demand satu per satu. Untuk keperluan Tabel 11.3 cukup diambil angka totalnya saja. Pada tabel ini dampak tersebut disajikan dalam angka nominal dan persentase sehingga dapat diketahui kontribusi tiap sektor demand terhadap perekonomian, dan terlihat apakah pengeluaran wisman memberi dampak yang lebih besar dari biaya promosi pariwisata, atau sebaliknya. Demikian pula dengan sektor demand yang lain.

Tabel 12.1
Dampak Kegiatan Pariwisata terhadap Output,
NTB, Upah/Gaji, Pajak Tak Langsung (Milyar Rp) dan
Tenaga Kerja (ribu orang) menurut Sektor Supply, Tahun T

No.	Sektor	Output	NTB	Upah/ Gaji	PTL	T K
1.	Pertanian					
2.	Pertambangan + Penggalian					
3.	Industri					
4.	Listrik, gas dan air minum					
5.	Bangunan					
6.	Perdagangan					
7.	Restoran dan hotel					
8.	Angkutan kereta api					
9.	Angkutan darat					
10.	Angkutan air					
11.	Angkutan udara					
12.	Jasa penunjang angkutan					
13.	Komunikasi					
14.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

Tabel 12.2
Distribusi Persentase Dampak Pariwisata terhadap Output,
NTB, Upah/Gaji, Pajak Tak Langsung dan
Tenaga Kerja menurut Sektor Supply, Tahun T

No.	Nama Sektor	Output	NTB	Upah/Gaji	PTL	T K
1.	Pertanian					
2.	Pertambangan + Penggalian					
3.	Industri					
4.	Listrik, gas dan air minum					
5.	Bangunan					
6.	Perdagangan					
7.	Restoran dan hotel					
8.	Angkutan kereta api					
9.	Angkutan darat					
10.	Angkutan air					
11.	Angkutan udara					
12.	Jasa penunjang angkutan					
13.	Komunikasi					
14.	Jasa Lainnya					
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 12.3
Dampak Pariwisata terhadap Output, NTB, Upah/Gaji,
Dan PTL menurut Sektor Demand, Tahun T

Uraian	Output	NTB	Upah/Gaji	PTL	TK (000)
A. Total Ekonomi (Miliar Rp)					
B. Total dampak Par					
1. Wisman					
2. Wisnusda					
3. Wis out regional					
4. Investasi					
5. Promosi					
C. Kontribusi Pariwisata (%)					
1. Wisman					
2. Wisnusda					
3. Wis out regional					
4. Investasi					
5. Promosi					

Tabel 12.4. Peranan Pariwisata dalam Struktur PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja

Tabel ini bertujuan untuk membandingkan antara besaran Output, Nilai Tambah dan Tenaga Kerja tiap sektor yang dikategorikan sebagai sektor pariwisata dengan kontribusi pariwisata pada besaran tersebut. Kontribusi pariwisata terhadap output dinyatakan dalam persentase yaitu persentase dampak terhadap output per sektor pada tabel 9.1 terhadap output sektor yang bersangkutan. Demikian pula kontribusi pariwisata terhadap NTB adalah persentase dampak terhadap NTB per sektor pada tabel 9.1 terhadap NTB sektor yang bersangkutan dan kontribusi pariwisata terhadap tenaga kerja adalah persentase dampak terhadap tenaga kerja per sektor pada tabel 9.1 terhadap tenaga kerja sektor yang bersangkutan. Pada tabel ini terlihat apakah kontribusi pariwisata pada output hotel dan restoran lebih besar dari pada kontribusi pariwisata pada angkutan darat, atau sebaliknya. Demikian pula dengan NTB dan Tenaga Kerja pada sektor yang lain.

Tabel 12.4
Peranan Pariwisata dalam Struktur PDB dan
Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun T

Sektor Pariwisata	Output		Nilai Tambah		Tenaga Kerja	
	Juta Rp	% Par	Juta Rp	% Par	Orang	% Par
Pertanian						
Pertambangan + Pengecilan						
Industri						
Listrik, gas dan air minum						
Bangunan						
Perdagangan						
Restoran dan hotel						
Angkutan kereta api						
Angkutan darat						
Angkutan air						
Angkutan udara						
Jasa penunjang angkutan						
Komunikasi						
Jasa Lainnya						
Jumlah						

Tabel 13: Indikator Fisik Kepariwisataa (untuk propinsi yang telah memiliki series data yang lengkap)

Tabel ini menyajikan informasi atau data pokok pariwisata yang bukan dalam satuan moneter, tetapi merupakan indikator fisik seperti:

- Jumlah kedatangan wisatawan (*visitor arrivals*) menurut berbagai karakteristik (negara/daerah asal, kebangsaan, maksud kunjungan, pintu masuk, moda transportasi, akomodasi, jenis kelamin, umur, dsb)
- Rata rata lama menginap (*length of stay*)
- Jumlah wisatawan mancanegara menurut moda utama transportasi yang digunakan (darat, laut, udara)

- Tingkat penghunian kamar hotel (*hotel occupancy rate*)
- Jumlah usaha pariwisata & pekerjanya.

Tabel 13.1. Jumlah Kunjungan Wisman Menurut Bulan Kedatangan, Tahun T-... – T

Tabel 13.1 ini menyajikan jumlah kunjungan wisman menurut bulan kedatangannya selama beberapa tahun. Jumlah kunjungan tidak sama dengan jumlah wisman karena seorang wisman dapat berkunjung beberapa kali ke Propinsi ini (*repeater*). Oleh sebab itu satuannya bukan orang tetapi kunjungan. Penyajian jumlah kunjungan selama beberapa tahun akan memperlihatkan pola kunjungan wisman. Akan terlihat pada bulan apa biasanya terdapat *low season* (sepi kunjungan) dan pada bulan apa terjadi *peak season* (ramai kunjungan).

Tabel 13.1
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Menurut Bulan Kedatangan, Tahun T-... - T

Bulan	T-..	T	..	T	T
Januari					
Pebruari					
Maret					
April					
Mei					
Juni					
Juli					
Agustus					
September					
Oktober					
Nopember					
Desember					

Tabel 13.2 Perkembangan Kunjungan Wisman dari 10 Pasar Utama

Data pada tabel 13.2 ini menggambarkan jumlah kunjungan wisman menurut pasar utama yaitu negara asal wisman yang wismanya banyak berkunjung ke propinsi ini selama beberapa tahun. Berdasarkan ranking jumlah kunjungan dari negara asal wisman, ditentukan 10 negara pada urutan teratas. Urutan ditentukan pada tahun pertama. Setelah itu urutan negara tidak diubah lagi walaupun jumlah kunjungan terbaru sudah tidak sesuai lagi dengan ranking lama. Hal ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan ranking tiap negara dalam pasar utama selama beberapa tahun. Pada baris terakhir disajikan data jumlah kunjungan seluruhnya (dari semua negara) sebagai perbandingan dengan jumlah kunjungan dari pasar utama.

**Tabel 13.2
Perkembangan Kunjungan Wisman
dari 10 Pasar Utama, Tahun T-... - T**

No	10 Pasar Utama	T -...	T- ...	T
1	Singapura			
2	Malaysia			
3	Jepang			
4	Taiwan			
5	Australia			
6	Korea Selatan			
7	Amerika Serikat			
8	Jerman			
9	Inggris			
10	Belanda			
	Jumlah 10 Pasar utama			
	Jumlah Seluruhnya			

Tabel 13.3 Persentase Kunjungan Wisman Menurut Moda Transportasi

Terdapat tiga macam moda transportasi yang digunakan wisman untuk berkunjung ke Indonesia yaitu transportasi udara, laut dan darat. Untuk suatu propinsi bisa hanya satu atau dua macam moda transportasi yang digunakan wisman untuk berkunjung ke propinsi tersebut. Penyajian jumlah kunjungan selama beberapa tahun akan memperlihatkan moda transportasi apa yang biasanya lebih banyak digunakan wisman. Panjang series data tergantung ketersediaan data di daerah.

Tabel 13.3
Persentase Kunjungan Wisman Menurut
Moda Transportasi, Tahun T - - T

Tahun	Moda Transportasi		
	UDARA	LAUT	DARAT
...			
.....			
....			
...			
.....			
....			
...			
.....			
....			
...			
.....			
....			
...			
.....			
....			

Tabel 13.4 Persentase Kunjungan Wisman Menurut Maksud Kunjungan

Terdapat enam kategori maksud kunjungan wisman ke Indonesia yaitu untuk bisnis, dinas, konvensi, liburan, pendidikan dan lainnya sebagaimana tercantum pada kartu kedatangan atau jawaban pada survei wisman yang dilakukan daerah. Penyajian jumlah kunjungan selama beberapa tahun akan memperlihatkan maksud kunjungan apa yang biasanya lebih banyak atau dominan. Panjang series data tergantung ketersediaan data di daerah.

Tabel 13.4
Persentase Kunjungan Wisman
Menurut Maksud Kunjungan, Tahun T-.. – T

Tahun	Maksud Kunjungan					
	Bisnis	Dinas	Konvensi	Liburan	Pendidkan	Lainnya
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						
...						

Tabel 13.5 Perkembangan TPK Hotel Berbintang Menurut Bulan

Pada tabel 13.5 ini disajikan Tingkat Penghunian Kamar (*room occupancy rate*) hotel menurut bulan selama beberapa tahun. Untuk mendapatkan angka TPK bulanan, laporan dari hotel harus secara kontinyu didapatkan baik oleh BPS maupun Dinas Pariwisata Daerah. Penyajian TPK selama beberapa tahun akan memperlihatkan pola penghunian kamar hotel. Akan terlihat pada bulan apa biasanya terdapat *low season* (sepi tamu hotel) dan pada bulan apa terjadi *peak season* (ramai tamu hotel).

Tabel 13.5
Perkembangan TPK Hotel Berbintang
Menurut Bulan, Tahun T-... - T

No.	Bulan	T...	T....	T
1	Januari			
2	Februari			
3	Maret			
4	April			
5	Mei			
6	Juni			
7	Juli			
8	Agustus			
9	September			
10	Oktober			
11	Nopember			
12	Desember			
	Total			

Tabel 13.6 Jumlah Usaha Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur Yang Tersedia Menurut Klasifikasi Akomodasi Pada Tahun T

Tabel 13.6 ini menyajikan jumlah usaha akomodasi, jumlah kamar dan tempat tidur yang tersedia di propinsi ini yang diperoleh dari registrasi yang dilakukan daerah atau sensus yang dilakukan BPS. Usaha jasa akomodasi dapat dibagi menjadi hotel berbintang, hotel non bintang dan akomodasi lainnya. Hotel berbintang terdiri dari hotel bintang satu sampai bintang lima, hotel non bintang terdiri dari hotel melati dan akomodasi lainnya terdiri dari penginapan remaja, pondok wisata dan jasa akomodasi.

Tabel 13.6
Jumlah Usaha Akomodasi, Kamar dan Tempat Tidur
Menurut Klasifikasi pada Tahun T

No	Klasifikasi Akomodasi	Unit Usaha	Kamar	Tempat Tidur
1	HOTEL BINTANG			
	Bintang 5			
	Bintang 4			
	Bintang 3			
	Bintang 2			
	Bintang 1			
2	HOTEL NON BINTANG			
	Melati			
3	AKOMODASI LAINNYA			
	Penginapan Remaja			
	Pondok Wisata			
	Jasa Akomodasi			
	JUMLAH			

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, Teknik Penyusunan Tabel Input-Output, Jakarta, Januari 2000

_____, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Jakarta, Desember 2005

Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, Klasifikasi Lapangan Usaha Pariwisata Indonesia (KLUPI) 1999, Jakarta, Desember 1999

United Nations and World Tourism Organization, Recommendations on Tourism Statistics, New York, 1994

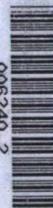
UN-Statistics Division, Central Product Classification (CPC), Version 1.0, series M, No. 77, Ver. 1.0, New York 1998

_____, System of National Accounts 1993. Prepared by ISWGNA (Eurostat, IMF, OECD, UN, World Bank), Washington DC, 1993.

World Tourism Organization, Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics, Technical Manual No. 1, Madrid, Spain, 1994

_____, Collection of Tourism Expenditure Statistics, Technical Manual No. 2, Madrid, Spain, 1994

006240.2



Kebu

B3.2

